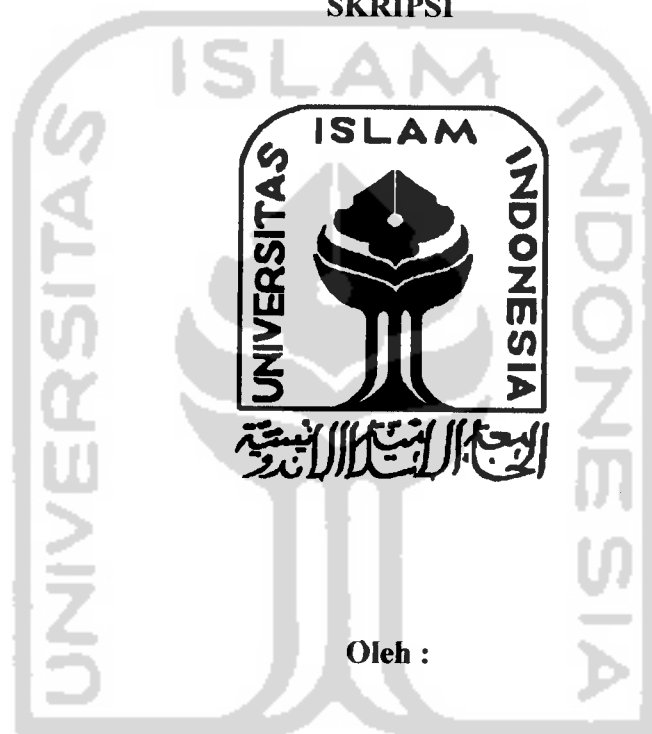


**PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN  
MAJALENGKA, 1988-2002**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NAMA : FITRI ROSYIDAH**  
**NOMOR MAHASISWA : 02313140**  
**PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA**

**2006**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN  
MAJALENGKA, 1988-2002**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**Oleh :**

**NAMA : FITRI ROSYIDAH  
NOMOR MAHASISWA : 02313140  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA**

**2006**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa sekripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 6 Januari 2006

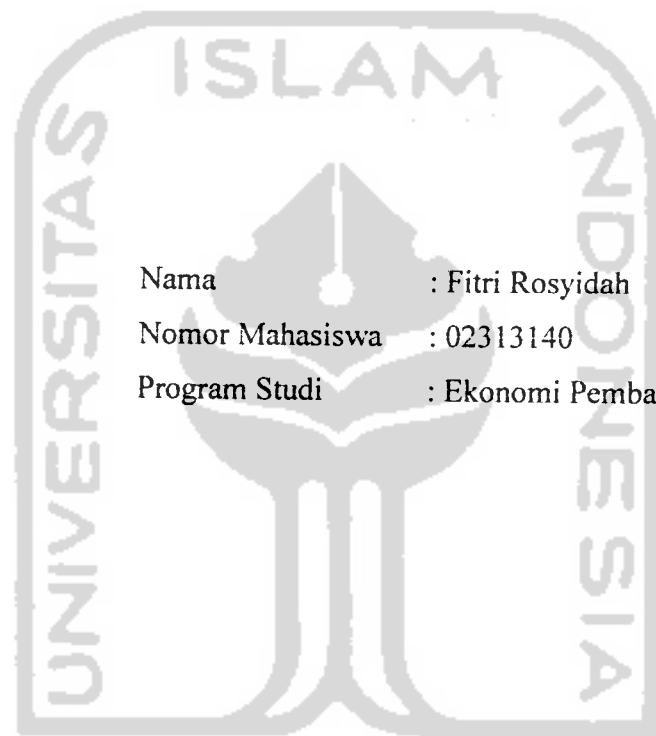
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fitri Rosyidah'.

Fitri Rosyidah

## PENGESAHAN

Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian  
Kabupaten Majalengka, 1988-2002



Nama : Fitri Rosyidah  
Nomor Mahasiswa : 02313140  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 6 Januari 2006

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaka Sriyana', is written over a horizontal line.

Dr. Jaka Sriyana

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**  
**SKRIPSI BERJUDUL**  
**PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP**  
**PEREKONOMIAN KABUPATEN MAJALENGKA, 1988 – 2002**

**Disusun Oleh : FITRI ROSYIDAH**  
**Nomor mahasiswa : 02313140**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 18 Februari 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dr. Jaka Sriyana

Penguji I : Dra. Ari Rudatin, M.Si

Penguji II : Drs. Moh. Bektu Hendri Anto, M.Sc.....

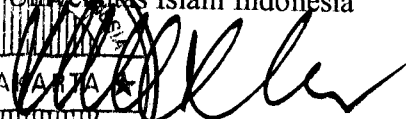


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA



**“Semakin besar kekuatan yang kita miliki akan semakin besar pula tanggungjawab yang ada dipundak kita”**

**“ ALLAH pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi. ”**  
**(Q.S. Al - Mujaadilah : 11)**

**“ ALLAH tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya.”**  
**(Q.S. Al - Baqarah : 286)**

Untuk dan Karena :

## ALLAH SUBHANAWATA'ALA

Kedua orang tua tercinta : Ayahanda H. Ayip Rosyidi, S. Pd dan Ibunda Hj. Nanah Rohanah, S. Ag yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, serta tanpa henti memanjatkan do'a kepada-NYA untuk keberhasilan anakmu ini. Dan Mereka adalah anugrah dan cinta terindah dari-Mu ya ALLAH.

kakaku Eva Nurlaela, S. Pd dan kakak iparku Wiwik Permadi, ST. serta adik-adikku tercinta M. Fajar Nugraha dan M. Yusuf yang selalau memberikan motivasi untuk menjadikan yang terbaik, dan dari kalian aku mendapatkan kasih sayang sejati.

Lalu Suparto, LM. SE. M. Si yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan pengertiannya serta motivasi dan pengorbanannya, dan juga yang telah memberikan kebahagiaan yang tak ternilai, tanpa itu semua keberhasilan ini tidak akan tercapai.

Keluarga besar bapak Lalu Muhajar, LB. yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, serta motivasi dan do'anya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum WR, WB*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka, 1988-2002”** yang merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Tak lupa salawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Banyak pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, yang berupaya memberikan bantuan, sumbangan pemikiran dan motivasi. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Jaka Sriyana selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan dorongan dengan penuh kearifan.
3. Seluruh Dosen pengajar dan seluruh staf Fakultas Ekonomi khususnya di Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi.



4. Petugas kantor Pemerintahan Daerah dan Biro Pusat Statistik Majalengka yang telah membantu dan memberikan informasi dalam pengumpulan data-data untuk skripsi ini.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah banyak berkorban demi keberhasilan ananda secara tulus dan ikhlas dan atas segala kasih sayang, dukungan dan do'anya, terimakasih untuk semuanya.
6. Saudara-saudaraku Yu Eva dan A wiwik terimakasih atas perhatian dan do'anya serta dukungan bagi penyelesaian studi ini. Kepada adik-adikku tercinta Fajar dan Dede Yusuf yang selalu memberikan motivasi untuk menjadikan yang terbaik, terimakasih atas semuanya.
7. Nenekku tercinta terimakasih atas kasih sayang dan do'anya, serta keluarga besar Jahidun (Alm) terimakasih atas semuanya.
8. Keluarga besar bapak Kasa Amar (Alm), terimakasih atas do'a dan perhatiannya.
8. Keluarga besar bapak H. Karma terimakasih atas nasehat-nasehatnya dan motivasinya.
9. Aa Youth yang selalu memberi dukungan, kasih sayang, pengorbanannya, dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih untuk semuanya.
10. Teman-temanku di Majalengka, Ina, Mas Tolim, Koko, Agung, neng Leli, Andy beserta keluarganya terimakasih atas doa serta dukungannya, dan Aris terimakasih atas bantuannya sudah mengantarkan penulis untuk mencari data.

11. Aa Aris Suhardiman, teteh Titin, Aa Agus dan juga mas Jack terimakasih atas dukungan serta Do'anya dan terimakasih atas bantuannya.
12. Teman-teman EP Angkatan 2002 Japar Malik, Hatta, Yulia, Lela, Leny, Supra, Sari, Lutfi, Muyas, Nuryasin, Nita, Ipuy, Beny, Eko, Dwi, dan teman lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan serta dukungannya dan semoga tetap terjaga kekompakannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan dorongan dalam mengikuti pendidikan ini.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sebagai masukan demi kesempurnaan tulisan ini selalu penulis harapkan. Dan penulis juga berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana penambah wawasan.

*Wassalamu'alaiikum WR, WB.*

Yogyakarta, 6 Januari 2006  
Penulis,

Fitri Rosyidah

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Halaman Pengesahan Ujian .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Halaman Kata Pengantar .....	vii
Halaman Daftar Isi .....	x
Halaman Daftar Tabel .....	xiii
Halaman Daftar Gambar .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xv
Halaman Abstrak .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN .....	9
2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Majalengka .....	9
2.2. Penduduk Kabupaten Majalengka .....	10
2.3. Perekonomian Kabupaten Majalengka .....	13
2.4. Pengeluaran Pembangunan Pendidikan Kabupaten Majalengka .....	15
2.5. Pengeluaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka .....	17
2.6. Pengeluaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Majalengka .....	19

BAB III KAJIAN PUSTAKA .....	22
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS .....	26
4.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah .....	27
4.2. PDRB .....	30
4.2.1. Pengertian PDRB .....	30
4.2.2. Manfaat Data PDRB .....	31
4.3. Pengeluaran Pemerintah .....	32
4.3.1. Model Pembangunan Pengeluaran Pemerintah .....	33
4.3.2. Hukum Wagner .....	35
4.3.3. Teori Paacock dan Wiseman .....	36
4.4. Hipotesis .....	37
BAB V METODE PENELITIAN .....	38
5.1. Data Yang Digunakan .....	38
5.2. Definisi Operasional Variabel .....	38
5.3. Alat Analisis .....	40
5.4. Uji Kriteria Kesesuaian Teoritik .....	43
5.5. Uji Pemilihan Model Empirik .....	43
5.6. Uji Diagnostik .....	45
5.6.1. Uji t-statistik .....	45
5.6.2. Uji F-statistik .....	46
5.6.3. Interpretasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	47
5.7. Uji Asumsi Klasik .....	46
5.7.1. Uji Normalitas .....	48
5.7.2. Uji Autokorelasi .....	49
5.7.3. Uji Multikolinearitas .....	51
5.7.4. Uji Heterokedastisitas .....	52
BAB VI ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	55
6.1. Data dan Variabel Penelitian .....	55

6.2. Hubungan Antarvariabel .....	55
6.3. Hasil Analisis dan Pembahasan .....	56
6.3.1. Hasil Regresi .....	56
6.3.2. Pemilihan Model .....	58
6.3.3. Uji Kesesuaian Teoritik .....	59
6.3.4. Uji Normalitas .....	60
6.3.5. Uji Linearitas .....	60
6.3.6. Uji Diagnostik .....	61
6.3.6.1. Uji t-statistik .....	62
6.3.6.2. Uji F-statistik .....	65
6.3.6.3. Interpretasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	66
6.3.7. Uji Asumsi Klasik .....	66
6.3.7.1. Uji Multikolinieritas .....	66
6.3.7.2. Uji Heterokedastisitas .....	67
6.3.7.3. Uji Autokorelasi .....	68
6.4. Interpretasi Hasil Analisis Regresi .....	69
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>72</b>
1. Kesimpulan .....	72
2. Implikasi .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. PDRB Konstan 1993 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka 1994-2000 .....	3
1.2. Proporsi Pengeluaran Rutin dan Pembangunan dalam APBD Kabupaten Majalengka 1994-2002 .....	5
2.1. Luas Daerah, Rumah Tangga, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka 2002 .....	12
2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka 1994-2002 .....	14
2.3. PDRB Kabupaten Majalengka Berdasarkan Lapangan Usaha 1997-2002 ...	15
2.4. Pengeluaran Pembangunan Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002 .....	16
2.5. Pengeluaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002 .....	18
2.6. Pengeluaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002 .....	20
6.1. Ringkasan Hasil Regresi... ..	57
6.2. Ringkasan Hasil <i>MWD test</i> .....	58
6.3. Hasil Uji Arah atau Tanda .....	59
6.4. Ringkasan Hasil Ramsey RESET Test .....	61
6.5. Correlation Matrix .....	67
6.6. Ringkasan Uji <i>White heteroskedasticity</i> .....	68

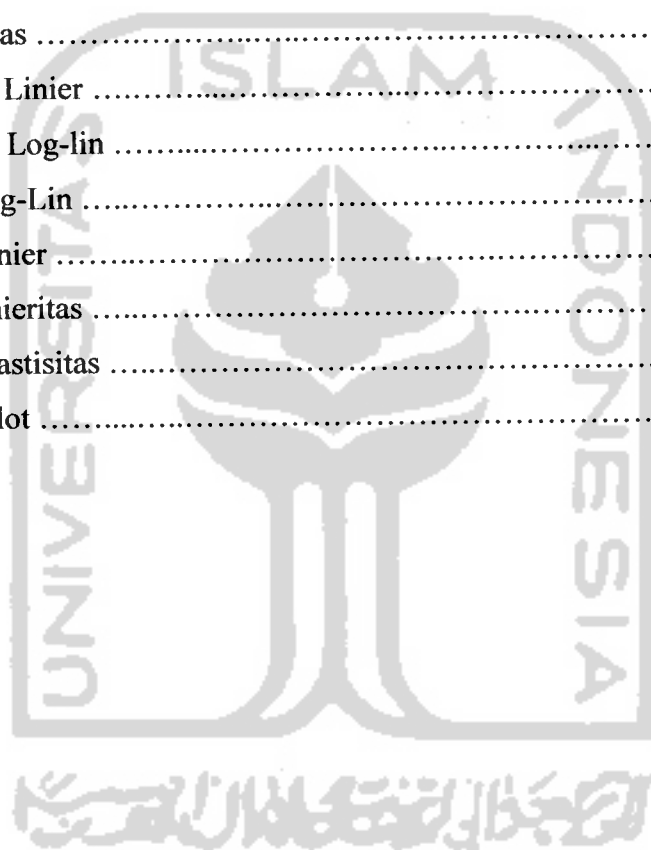
## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
6.1. Uji Parameter Variabel Pengeluaran Pendidikan .....	63
6.2. Uji Parameter Variabel Pengeluaran Kesehatan .....	64
6.3. Uji Parameter Variabel Pengeluaran Infrastruktur .....	65
6.4. Uji F-statistik .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Data .....	76
II. Data Rasio Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka .....	77
III. Uji Normalitas .....	78
IV. Uji Linieritas .....	79
V. MWD test Linier .....	80
VI. MWD test Log-lin .....	81
VII. Regresi Log-Lin .....	82
VIII. Regresi Linier .....	83
IX. Multikolinieritas .....	84
X. Heterokedastisitas .....	85
XI. Residual Plot .....	86





## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series selama periode 1988-2002. Data berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik Indonesia.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi, model regresi yang digunakan adalah model regresi pertumbuhan ekonomi makro yang dikembangkan oleh Skinner (1987). Dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pembangunan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka selama periode 1988-2002. Pada tingkat  $\alpha$  5%, diperoleh koefisien regresi pengeluaran pembangunan sektor pendidikan sebesar 0,11, artinya peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pendidikan sebesar 1 rupiah *ceteris paribus* akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Majalengka sebesar 0,11 rupiah. Koefisien regresi pengeluaran pembangunan sektor kesehatan sebesar 0,14, artinya peningkatan pengeluaran pembangunan sektor kesehatan sebesar 1 rupiah *ceteris paribus* akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Majalengka sebesar 0,14 rupiah. Koefisien regresi pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur sebesar 0,02 rupiah, artinya peningkatan pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur sebesar 1 rupiah akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Majalengka sebesar 0,02 rupiah. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa pada akhirnya pemerintah daerah harus mempunyai perhatian dan menjadikan pengeluaran pada tiga sektor ini sebagai prioritas guna meningkatkan perekonomian daerah dalam jangka panjang, hal ini karena hasil penelitian yang menunjukkan ketiga variabel penjelas yang digunakan untuk menganalisis perekonomian daerah yaitu pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berarah positif dan mempunyai pengaruh signifikan.

Kata kunci : Perekonomian daerah, PDRB, Pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual.

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000)

Menurut Arsyad, (1999) yang mengutip dari pendapat Blakely, (1989) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Kabupaten Majalengka adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat yaitu ; Sebelah Barat antara  $108^{\circ} 03'$  –  $108^{\circ} 19'$  Bujur Timur, Sebelah Timur  $108^{\circ} 12'$  –  $108^{\circ} 25'$  Bujur Timur, Sebelah Utara antara  $6^{\circ} 36'$  –  $6^{\circ} 58'$  Lintang Selatan dan Sebelah Selatan  $6^{\circ} 43'$  –  $7^{\circ} 03'$  Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan

Struktur perekonomian Kabupaten Majalengka yang digambarkan oleh distribusi PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa sektor jasa dan pertanian masih merupakan sektor yang dominan dan menjadi andalan dalam memberikan nilai tambah PDRB Kabupaten Majalengka, di mana kontribusi yang diberikan sektor ini cukup besar. Sebagai gambaran, berikut tabel 1.1 yang menunjukkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Majalengka berdasarkan harga konstan 1993 selama tahun 1994 sampai 2000.

TABEL 1.1  
PDRB Konstan 1993 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Majalengka 1994-2000.

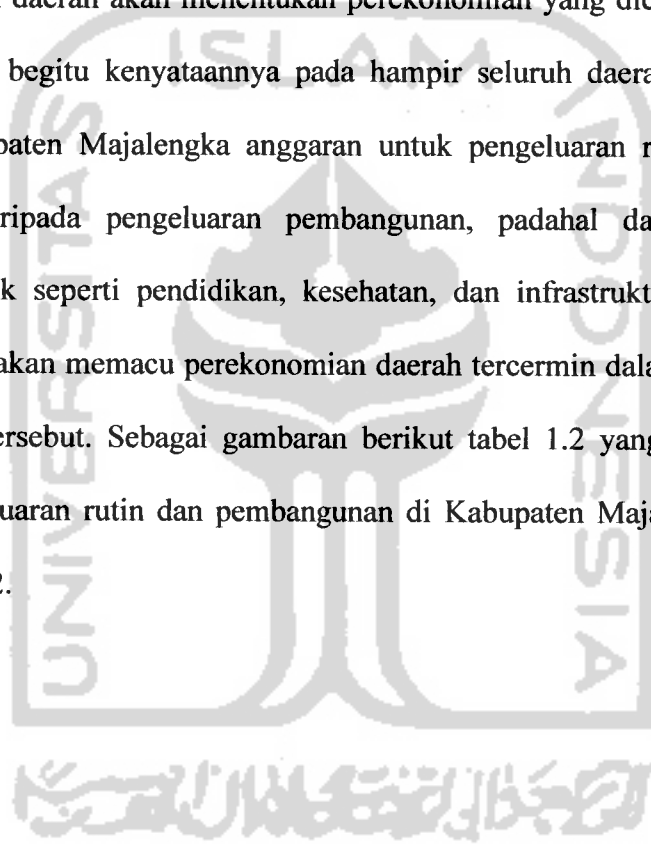
Tahun	PDRB konstan 1993 (juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1994	931.056,24	7,75
1995	1.008.596,61	8,33
1996	1.094.661,75	8,53
1997	1.147.606,63	5,11
1998	1.040.316,22	-9,35
1999	1.076.716,03	3,50
2000	1.126.602,13	4,63

Sumber : Majalengka dalam Angka, BPS Majalengka, 2001

Pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka selama tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan, namun pada tahun 1997 mulai menurun, penurunan ini terjadi karena pengaruh dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Penurunan ini terus merosot sampai pada tahun 1998, bahkan mencapai angka minus sebesar -9,35. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mulai bangkit kembali walaupun hanya mencapai 3,50% dan pada tahun 2000 sebesar 4,63%.

Dalam hal pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi anggarannya (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi

sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah. Pemahaman akan betapa pentingnya peran anggaran sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berfungsi memacu perekonomian suatu daerah harus berhadapan dengan kondisi di lapangan yang tidak dapat menjamin berjalannya fungsi tersebut dengan baik. Besar kecilnya pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah akan menentukan perekonomian yang dicapai oleh suatu daerah. Namun begitu kenyataannya pada hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Majalengka anggaran untuk pengeluaran rutin cenderung lebih besar daripada pengeluaran pembangunan, padahal dana-dana untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dalam jangka panjang akan memacu perekonomian daerah tercermin dalam pengeluaran pembangunan tersebut. Sebagai gambaran berikut tabel 1.2 yang menunjukkan besarnya pengeluaran rutin dan pembangunan di Kabupaten Majalengka selama tahun 1994-2002.



TABEL 1.2  
Proporsi Pengeluaran Rutin dan Pembangunan dalam APBD  
Kabupaten Majalengka 1994-2002. (Ribu Rp)

Tahun	Pengeluaran rutin	Pengeluaran pembangunan	Total pengeluaran rutin dan pembangunan
1994	12.044.858,00	14.542.163,00	26.587.021,00
1995	14.673.391,00	17.482.234,00	32.155.625,00
1996	16.876.520,00	19.339.130,00	36.215.650,00
1997	29.904.674,13	20.826.922,34	50.731.596,47
1998	63.474.548,00	33.357.606,00	96.832.150,00
1999	87.948.490,00	27.563.880,00	115.512.370,00
2000	85.077.870,00	27.212.431,00	112.290.301,00
2001	190.043.067,00	56.988.812,00	247.031.879,00
2002	228.786.692,00	80.652.263,00	309.438.955,00

*Sumber* : Kabupaten Majalengka dalam Angka (berbagai terbitan)  
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpkpd.go.id](http://www.djpkpd.go.id))

Pada tabel 1.2 diatas, dapat dilihat secara umum pengeluaran rutin dan pembangunan di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2002. Hal menarik adalah pada tahun 1998 yaitu tahun pertama Indonesia dilanda krisis ekonomi, anggaran pengeluaran rutin di Kabupaten Majalengka tetap naik tetapi anggaran untuk pengeluaran pembangunan mengalami penurunan. Imbasnya perekonomian di Kabupaten Majalengka yang digambarkan oleh pertumbuhan ekonomi juga menjadi turun bahkan mencapai angka minus (lihat tabel 1.1). Ini menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pembangunan yang dianggarkan dan dialokasikan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Majalengka akan turut menentukan besarnya peran pemerintah daerah dalam pencapaian perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh peran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka melalui kebijakan pengeluaran pembangunan terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap perekonomian daerah Kabupaten Majalengka. Judul penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut ; **Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka, 1988-2002.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahannya adalah bagaimana pengaruh atau peran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka ditinjau dari kebijakan pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian daerah Majalengka selama tahun 1988 sampai dengan 2002.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dan menaksir besarnya pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah daerah pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap perekonomian daerah Kabupaten Majalengka selama tahun 1988 sampai dengan 2002.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Memahami hubungan pengeluaran pembangunan pemerintah untuk pelayanan dasar sektor publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan perekonomian daerah.

2. Membuktikan peran pemerintah daerah dalam proses perekonomian daerah melalui kebijakan alokasi pengeluaran pembangunan yang tercermin pada APBD Kabupaten Majalengka.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

Memuat penjelasan tentang objek penelitian menyangkut keadaan geografis, profil Kabupaten Majalengka dan sebagainya.

##### **BAB III KAJIAN PUSTAKA**

Berisikan studi pustaka terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

##### **BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

menjelaskan teori – teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian serta hipotesis penelitian.

##### **BAB V METODE PENELITIAN**

Menjelaskan data, variabel dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.



## BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

menyajikan hasil estimasi data melalui metode penelitian yang telah dijelaskan dalam BAB V.

## BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Memuat simpulan dari analisis data dan implikasi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan bagi pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

#### 2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Majalengka

Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat yaitu ; Sebelah Barat antara  $108^{\circ} 03'$  –  $108^{\circ} 19'$  Bujur Timur, Sebelah Timur  $108^{\circ} 12'$  –  $108^{\circ} 25'$  Bujur Timur, Sebelah Utara antara  $6^{\circ} 36'$  –  $6^{\circ} 58'$  Lintang Selatan dan Sebelah Selatan  $6^{\circ} 43'$  –  $7^{\circ} 03'$  Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten kuningan

Luas Wilayah Kabupaten Majalengka adalah  $1.204,24 \text{ Km}^2$ , yang berarti Kabupaten Majalengka hanya sekitar 2,71% dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih  $44.357,00 \text{ Km}^2$ ) dengan ketinggian tempat antara 19 - 857 m diatas permukaan laut. Dilihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

- Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m diatas permukaan laut dengan luas 482,02 Km<sup>2</sup> atau 40,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km<sup>2</sup> atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km<sup>2</sup> atau 28,70% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Tipe iklim di Kabupaten Majalengka termasuk bervariasi, suhu berkisar antara 18,8 – 37,0 °C. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sekitar 404,8 mm dengan hari hujan 26 hari, sedangkan pada bulan Juli dan Agustus tidak ada hujan.

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara ; 0-37 Km, Kecamatan Lemahsugih merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten Majalengka ke Kabupaten-kabupaten di Seluruh Jawa Barat berkisar antara 46 – 389 Km.

## **2.2. Penduduk Kabupaten Majalengka**

Penduduk merupakan asset pembangunan bagi suatu daerah, kesejahteraan penduduk adalah tujuan umum dari pembangunan. Jumlah penduduk yang besar serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi pada suatu daerah akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilakukan dan dicita-citakan.

Pertumbuhan penduduk pada seluruh daerah di Indonesia umumnya terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data sampai pada tahun 2002, jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka mencapai 1.153.442 jiwa, terdiri dari 576.412 jiwa penduduk laki-laki dan 577.030 jiwa penduduk perempuan. Total rumah tangga sebanyak 313.078 jiwa dengan kepadatan penduduk 958 jiwa per kilometer dan konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di dua lokasi yaitu kecamatan Dawuan dan kecamatan Bantarujeg (tabel 2.1).



**TABEL 2.1**  
**Luas Daerah, Rumah Tangga, Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka 2002**

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Rumah tangga	Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
				Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Lemahsugih	78,64	14.151	27.216	27.409	54.625	695
2	Bantarujeg	111,56	21.227	40.967	41.892	82.859	743
3	Cikijing	43,54	15.717	28.078	28.390	56.468	1.297
4	Cingambul	37,03	9.674	17.089	17.427	34.516	932
5	Talaga	43,50	10.958	20.368	20.254	40.622	934
6	Banjaran	41,98	7.232	12.140	11.771	23.911	570
7	Argapura	60,56	9.079	16.686	16.735	33.421	552
8	Maja	65,21	12.147	23.188	23.543	46.731	717
9	Majalengka	57,00	17.313	32.163	33.755	65.918	1.156
10	Cigasong	24,17	8.765	15.708	15.580	31.288	1.294
11	Sukahaji	56,49	15.090	27.330	26.082	53.412	946
12	Rajagaluh	34,37	10.707	21.002	20.600	41.602	1.210
13	Sindangwangi	31,76	7.076	15.420	14.772	30.192	951
14	Leuwimunding	32,46	14.965	29.747	30.179	59.926	1.846
15	Palasah	38,69	12.618	23.419	22.793	46.212	1.194
16	Jatiwangi	40,03	21.790	40.564	40.853	81.417	2.034
17	Dawuan	55,41	24.139	43.669	43.047	86.716	1.565
18	Panyingkiran	22,98	8.359	14.557	14.368	28.925	1.259
19	Kadipaten	21,86	11.772	21.231	21.581	42.812	1.958
20	Kertajati	138,36	13.306	22.210	21.869	44.079	319
21	Jatitujuh	73,66	15.873	26.353	26.312	52.665	715
22	Ligung	62,25	17.000	29.747	29.486	59.233	952
23	Sumberjaya	32,73	14.120	27.560	28.332	55.892	1.708
<b>Kabupaten Majalengka</b>		<b>1.204,24</b>	<b>313.078</b>	<b>576.412</b>	<b>577.030</b>	<b>1.153.442</b>	<b>958</b>

Sumber :Majalengka dalam Angka, BPS Kabupaten Majalengka, 2003

### **2.3. Perekonomian Kabupaten Majalengka**

Perekonomian daerah umumnya dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi selalu dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi ekonominya, perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar 1993 dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga terhadap sektor-sektor yang menjadi indikator dalam perhitungan PDRB.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka selama tahun 1994 sampai 2002 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya PDRB Kabupaten Majalengka berdasarkan harga konstan 1993 rata-rata PDRB Kabupaten Majalengka sebesar 981,634,96 juta Rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04%. Tahun 1994 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka sebesar 7,75% meningkat sampai 8,53% pada tahun 1996. Tahun 1997 awal dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka turun menjadi 5,06% dan mencapai angka minus 9,35% pada tahun 1998. Tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka kembali naik menjadi 3,45% dan terus meningkat mencapai 4,92% pada tahun 2001 (tabel 2.2). Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena dampak positif dari diberlakukannya otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001 dan sumbangan atau kontribusi sektor yang cukup potensial terhadap PDRB juga semakin meningkat, sektor tersebut antara lain, jasa, perdagangan, pertanian, serta industri pengolahan di Kabupaten Majalengka.

TABEL 2.2  
 Pertumbuhan Ekonomi  
 Kabupaten Majalengka 1994-2002  
 (dalam Juta)

Tahun	PDRB (Harga konstan 1993)	Laju Pertumbuhan (%)
1994	931.056.24	7.75
1995	1.008.596.61	8.33
1996	1.094.661.75	8.53
1997	1.150.027.29	5.06
1998	1.042.472.24	-9.35
1999	1.078.387.28	3.45
2000	1.126.602.16	4.47
2001	1.182.141.67	4.92
2002	1.220.769.35	3.27
Rata-rata	981.634.96	4.04

Sumber :Majalengka dalam Angka, BPS Kabupaten Majalengka, 1994-2003

Di Kabupaten Majalengka sektor yang terbesar kontribusinya terhadap perekonomian adalah sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB karena hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Majalengka bergerak dalam sektor ini. Sektor kedua adalah sektor perdagangan selain sektor perdagangan, sektor jasa menjadi sektor cukup dominan, ini disebabkan karena kondisi geografis Kabupaten Majalengka yang lebih banyak berkondisi pegunungan, sehingga sektor jasa transportasi memainkan peranan penting sebagai penunjang produktifitas masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

TABEL 2.3  
PDRB Kabupaten Majalengka Berdasarkan Lapangan Usaha 1997-2002

LAPANGAN USAHA	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Pertanian	324.269,19	325.488,60	353.718,69	367.435,36	380.098,72	370.144,30
Pertambangan dan Penggalian	42.600,00	30.578,27	19.543,53	23.489,85	25.580,51	28.767,27
industri Pengolahan	173.664,00	137.330,04	138.184,01	145.489,30	156.589,80	165.877,50
Listrik, gas dan air bersih	4.900,00	4.656,22	4.948,24	5.159,97	5.659,33	6.242,89
Bangunan	70.680,00	60.434,44	59.250,00	62.545,00	64.603,52	70.184,77
Perdagangan, Hotel & Restoran	229.514,00	195.835,98	205.469,95	212.940,23	224.225,15	239.985,81
Pengangkutan dan Telekomunikasi	61.755,67	63.204,96	67.723,07	72.593,82	76.603,44	81.768,43
Keuangan, Persewaan, & Jasa perusahaan	64.738,77	48.766,84	50.190,58	53.147,32	54.815,72	57.184,04
Jasa-Jasa	175.485,00	174.020,87	177.687,96	183.801,28	193.965,48	200.614,34
<b>PDRB</b>	<b>1.147.606,63</b>	<b>1.040.316,22</b>	<b>1.076.716,03</b>	<b>1.126.602,13</b>	<b>1.182.141,67</b>	<b>1.220.769,35</b>

Sumber :Majalengka dalam Angka, BPS Kabupaten Majalengka, 1998-2003

#### 2.4. Pengeluaran Pembangunan Pendidikan Kabupaten Majalengka

Tingginya kualitas pendidikan akan menentukan pelayanan pendidikan, yang tersedia pada daerah. Hal ini juga ditentukan oleh status sosial ekonomi rumah tangga (pendapatan, budaya, dll). Seperti pada pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan yang ideal juga harus memungkinkan untuk dapat menyediakan seluruh pelayanan pendidikan dan alternatif-alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar tingkat pendapatan yang berbeda. Ketentuan pelayanan pendidikan harus pada saat yang tepat, kualitas yang memadai, sehingga memungkinkan, kesesuaian dengan norma di daerah dan memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan pendidikan ini mencakup pelayanan pendidikan dasar seperti SD, SMP, SMU, dan sekolah tinggi. Berikut tabel 2.4 yang menunjukkan besarnya pengeluaran pembangunan pendidikan Kabupaten Majalengka pada tahun 1988-2002.



**TABEL 2.4**  
**Pengeluaran Pembangunan Pendidikan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002**

Tahun	Pengeluaran Pendidikan (ribu Rp)	% Thd APBD	Tahun	Pengeluaran Pendidikan (ribu Rp)	% Thd APBD
1988	57.069,00	0.8	1996	2.947.795,00	8.1
1989	452.614,00	4.8	1997	3.676.345,00	7.2
1990	1.311.773,00	8.7	1998	5.587.434,00	5.8
1991	2.389.544,00	13.9	1999	3.002.092,00	2.6
1992	2.974.470,00	14.1	2000	1.806.829,00	1.6
1993	1.378.815,00	5.6	2001	7.965.000,00	3.2
1994	2.382.175,00	8.9	2002	6.315.140,00	2.0
1995	3.036.135,00	9.4			

Sumber : Majalengka dalam angka, BPS Majalengka (berbagai terbitan)  
 Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, BPS Indonesia (berbagai terbitan)

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, data tahun 1988-2002 menunjukkan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi. Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan yang terendah adalah sebesar 57.069,00 ribu pada tahun 1988, dan tertinggi adalah sebesar 7.965.000,00 ribu pada tahun 2001. Besar dan kecilnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan umumnya lebih layak dilihat dari persentasenya terhadap total pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam APBD pemerintah daerah setiap tahunnya. Berdasarkan persentasenya terhadap total APBD pengeluaran pembangunan sektor pendidikan terbesar terjadi pada tahun 1992 yaitu 14,1% dan terendah pada tahun 1988 yaitu 0,8%. Pada tahun 1988 sampai 1992 persentase pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan mencapai 14,1% dan tahun 1993 turun menjadi 5,6% dan kemudian meningkat lagi tahun 1994 sampai pada tahun 1996 namun

peningkatannya tidak sampai 10% dari total APBD. Tahun 1997 persentase pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka turun dan ini berlangsung sampai pada tahun 2000. Tahun 2001 pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka meningkat namun hanya 3,2% dari total APBD dan kemudian turun lagi menjadi 2,0% pada tahun 2002. Rendahnya pengeluaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan di daerah, padahal tinggi dan rendahnya produktifitas bagi pencapaian perekonomian daerah sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang salah satunya ditentukan dari tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk suatu daerah.

## **2.5. Pengeluaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Majalengka**

Determinan kesehatan adalah status sosial-ekonomi rumah tangga (pendapatan, budaya, dan sebagainya); higienitas dan sanitasi lingkungan (air bersih, toilet, rumah, dan sebagainya); usaha-usaha kesehatan (kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana, imunisasi, perbaikan gizi, dan lain-lain) dan kesuburan. Pelayanan kesehatan adalah determinan utama dari tingkat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang ideal harus dapat menyediakan semua pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan. Penyediaan pelayanan kesehatan harus berada pada waktu yang tepat dan kualitas yang tepat, berkesinambungan, sejalan dengan norma masyarakat dan memenuhi

harapan masyarakat. Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

TABEL 2.5  
Pengeluaran Pembangunan Kesehatan  
Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002

Tahun	Pengeluaran Kesehatan (ribu Rp)	%Thd APBD	Tahun	Pengeluaran Kesehatan (ribu Rp)	% Thd APBD
1988	24.957,00	0.3	1996	835.551,00	2.3
1989	546.515,00	5.8	1997	1.264.442,32	2.5
1990	1.030.825,00	6.9	1998	1.394.168,00	1.4
1991	665.524,00	3.9	1999	789.152,00	0.7
1992	806.060,00	3.8	2000	952.620,00	0.8
1993	1.294.397,00	5.3	2001	5.376.889,00	2.2
1994	947.678,00	3.6	2002	3.309.472,19	1.1
1995	741.390,14	2.3			

Sumber : Majalengka dalam angka, BPS Majalengka (berbagai terbitan)  
Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, BPS Indonesia (berbagai terbitan)

Berdasarkan tabel 2.5 diatas, data tahun 1988 sampai 2002 menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap pembangunan kesehatan tidak jauh berbeda dengan pengeluaran pendidikan, berfluktuasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan pada tahun pengamatan yaitu tahun 1988 sampai 2002, besarnya persentase pengeluaran kesehatan di Kabupaten Majalengka berada dibawah 10% dari total APBD. Persentase pengeluaran kesehatan terbesar hanya mencapai 6,9% pada tahun 1990 dan terkecil pada tahun 1988 sebesar 0,3%. Tahun 1998 dimana puncak krisis ekonomi terjadi di Indonesia, pengeluaran kesehatan pemerintah Kabupaten Majalengka turun dari 1,4% menjadi 0,7% pada tahun 1999 dan kemudian meningkat sebesar 0,1% pada tahun 2000 menjadi 0,8%. Pada saat otonomi daerah diberlakukan yaitu pada tahun 2001 persentase pengeluaran kesehatan hanya 2,2% dari total APBD dan kemudian turun menjadi 1,1% pada tahun 2002.

Kecilnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Majalengka dalam sektor kesehatan ini menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya pada masyarakat yang kurang mampu (miskin). Pelayanan kesehatan yang berkualitas idealnya ditujukan pada perbaikan gizi, upaya jangka waktu harapan hidup, penurunan kematian bayi dan ibu melahirkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa masalah kekurangan gizi dan buruknya kondisi kesehatan lebih disebabkan oleh kemiskinan atau ketidakmampuan orang-orang miskin untuk membayar biaya kesehatan, dan untuk menghindari hal ini perlu adanya upaya dan perhatian pemerintah daerah bagaimana agar keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan dapat diprioritaskan dengan cara lebih meningkatkan pengeluaran pembangunan khususnya di sektor kesehatan.

## **2.6. Pengeluaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Majalengka**

Tersedianya prasarana/infrastruktur yang cukup merupakan salah satu faktor penting berjalannya dengan baik proses pembangunan suatu daerah. Gravitasi ekonomi sangat tergantung kepada sarana lalu lintas seperti jalan, jembatan, lalu lintas barang dan jasa-jasa serta mobilitas faktor produksi sangat ditentukan oleh prasarana/infrastruktur yang ada.

Kabupaten Majalengka yang mempunyai karakteristik geografi dan topografi yang lebih banyak pegunungan, memerlukan pembangunan infrastruktur yang kuat dalam rangka membuka akses kedaerah terpencil, membuka akses ekonomi, dan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki dan masih belum digarap. Oleh karena itu, persoalan-persoalan infrastruktur ini harus menjadi

prioritas bagi Kabupaten Majalengka, dimana pemerintah Kabupaten Majalengka agar dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk belanja pembangunan khususnya di sektor infrastruktur. Berikut ini tabel 2.6 yang menunjukkan besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 1988 sampai 2002.

TABEL 2.6  
Pengeluaran Pembangunan Infrastruktur  
Kabupaten Majalengka Tahun 1988-2002

Tahun	Pengeluaran Infrastruktur (ribu Rp)	%Thd APBD	Tahun	Pengeluaran Infrastruktur (ribu Rp)	% Thd APBD
1988	1.907.827,00	27.4	1996	10.716.768,00	29.6
1989	2.751.847,00	29.4	1997	11.204.558,20	22.1
1990	5.768.153,00	38.4	1998	22.593.714,00	23.3
1991	5.511.329,00	31.9	1999	14.706.974,00	12.7
1992	7.133.892,00	33.7	2000	16.309.566,00	14.5
1993	7.704.462,00	31.3	2001	28.336.021,00	11.5
1994	8.932.059,00	33.6	2002	37.237.286,41	12.0
1995	9.325.516,00	29.0			

Sumber : Majalengka dalam angka, BPS Majalengka (berbagai terbitan)  
Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, BPS Indonesia (berbagai terbitan)

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, dapat dilihat besarnya pengeluaran pembangunan infrasturuktur di Kabupaten Majalengka secara keseluruhan dari tahun 1988 sampai 2002 besarnya diatas 20% dari total APBD. Persentase terbesar dicapai pada tahun 1992 yaitu 33,7% dan terkecil sebesar 11,5% pada tahun 2001. Pada saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia persentase pengeluaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka terhadap APBD masih berkisar diatas 20% yaitu 22,1% namun sejak tahun 1999 besarnya pengeluaran pembangunan pada sektor ini mulai menurun dibawah 20% dari total APBD. Tahun 1999 hanya 12,7% kemudian meningkat menjadi 14,5% pada tahun 2000.

Tahun 2001 dimana awal diberlakukannya otonomi daerah, pengeluaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka turun menjadi 11,5% dan kemudian meningkat kembali 05% menjadi 12,0% dari total APBD pada tahun 2002.



### **BAB III**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian daerah sudah banyak dilakukan, penelitian-penelitian tersebut sangat bermanfaat sebagai referensi bagi penulisan penelitian ini dan sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian ini, beberapa penelitian tersebut antara lain ;

Siti Aisyah Tri Rahayu (2001), meneliti peranan sektor publik lokal dan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi regional dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia selama tahun 1987-1996. Alat analisis yang digunakan metode regresi data panel model pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah pada seluruh lokasi penelitian dalam pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Lebih lanjut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam membuat perencanaan ekonomi sangat dibutuhkan dan akan sangat membantu pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah agar lebih efisien.

Heni Wahyuni (2004), meneliti peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di sebagian besar Negara Asia Pasifik yang mempunyai kesamaan latar belakang ekonomi periode 1980-2000. Alat analisis yang digunakan adalah regresi unbalanced panel method. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koefisien pangsa pengeluaran pemerintah terhadap GDP

adalah negatif signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa komponen konsumsi mendominasi pengeluaran anggaran pemerintah, hasil ini sejalan dengan kenyataan bahwa sebagian besar negara-negara di kawasan penelitian menemui masalah dalam manajemen pengeluaran pemerintah. Sehingga pengeluaran yang besar untuk konsumsi bagi kepentingan pemerintah sendiri menutupi efek positif investasi publik. Namun demikian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koefisien penerimaan pajak bertanda positif. Hasil yang signifikan menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi dimana meningkatnya penerimaan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, oleh karena itu kebijakan pemerintah sebaiknya mendukung akumulasi penerimaan pemerintah yang mempunyai peran potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ira Setiati (1997), mengkaji peran investasi, mutu modal manusia, perubahan demografi, dan sektor pemerintah dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis dilakukan terhadap 25 propinsi di Indonesia untuk periode 1983/1984 s.d. 1992/1993. Hasil analisis menunjukkan kesimpulan bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah yang merupakan proksi besarnya sektor pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun kecil dari segi besarnya. Di satu pihak, hal ini sesuai dengan arah kebijakan yang ditempuh, dimana pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi memang tidak diharapkan datang dari sektor pemerintah melainkan dari sektor swasta (jumlah anggaran pemerintah daerah sangat terbatas). Di pihak lain,



mengingat bahwa peranan pemerintah masih tetap diperlukan dalam konteks pembangunan bangsa, maka perlu diperhatikan adanya kemungkinan ketidakefisienan penggunaan anggaran yang menyebabkan output yang dihasilkan dari anggaran itu tidak sebesar yang diharapkan.

Imron Rosyadi (2000); melakukan kajian terhadap hubungan antara Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang diestimasi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan menerapkan model kausalitas koreksi kesalahan (ECM). Analisis dilakukan terhadap data sekunder berupa PDRB Kota Jambi berdasarkan harga konstan (tanpa migas) dan Pengeluaran Pembangunan Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan. Dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ida Bagus Raka Surya Atmaja (2001); menganalisis pengaruh investasi swasta, investasi sektor publik yang meliputi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak/non pajak serta pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kota di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan yang sangat dominan di Propinsi Bali, terlihat dari signifikansinya melebihi investasi pemerintah. Hal ini menunjukkan dalam suatu perekonomian

diharapkan peranan pemerintah semakin berkurang, hanya sebagai fasilitator dan peranan masyarakat swasta semakin meningkat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada lokasi dan objek penelitian serta data yang digunakan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data sama, namun dalam penelitian ini metode yang digunakan hanya metode regresi sederhana dengan teknik estimasi *Ordinary Least Square* (OLS).



## BAB IV

### LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Sebuah perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumberdaya bersumber dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Namun dalam kenyataan sehari-hari, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Pada prakteknya, perekonomian pasar seringkali terlilit kolusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau pengangguran; pada prakteknya pula, distribusi pendapatan dalam masyarakat *laissez-faire* sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peranan penting dalam perekonomian. Menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni (1) meningkatkan efisiensi, (2) menciptakan pemerataan atau keadilan serta (3) memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.

Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha memperbaiki kegagalan-kegagalan pasar, misalnya dengan mencegah monopoli dan eksternalitas negatif (misalnya polusi) demi terpacunya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan

pengangguran, serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, dengan menilai peran pemerintah dalam mengobati masalah-masalah ekonomi, harus diwaspadai pula kemungkinan terjadinya kegagalan pemerintah yang dapat menyebabkan masalah menjadi lebih parah.

#### **4.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Djojohadikusumo,1994)

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Djojohadikusumo,1994).

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (1998) dalam kepustakaan pembangunan ekonomi

pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik, dan model pertumbuhan endogen.

Blakely (1994) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Blakely dan Bradshaw, 2002: 71; Arsyad, 1999: 298). Menurut Mardiasmo (2002: 221) pembangunan ekonomi daerah merupakan pembangunan daerah di sektor ekonomi yang perumusan dan pelaksanaannya tetap berpegang pada tujuan pembangunan daerah, sedangkan pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Kuncoro (2004: 3) melihat tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Menurut Todaro dan Smith (2003: 79-82) serta Arsyad (1999: 214-220) ada tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat yaitu; pertama, akumulasi modal (*capital accumulation*) yang meliputi semua bentuk atau jenis yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; kedua, pertumbuhan penduduk (*growth in population*), yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; dan kemajuan teknologi (*technological progress*), yang bagi kebanyakan ekonom dan terutama teknokrat merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Menurut Sukirno (2003: 10) Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Kuncoro (2004: 114) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tentu memiliki sasaran fundamental yang ingin dicapai oleh masing-masing daerah antara lain:

1. meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah;
2. meningkatnya pendapatan per kapita;

### 3. mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, menurut Lewis (1966) unsur-unsur kebijakan ini meliputi:

(i) penyelidikan potensi pembangunan; survei sumber daya nasional, penelitian ilmiah; penelitian pasar; (ii) penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik, transportasi dan telekomunikasi) apakah oleh badan usaha negara atau swasta; (iii) penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan ketrampilan yang diperlukan; (iv) perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian, khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, perusahaan, dan transaksi ekonomi; (v) bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak dan lebih baik; (vi) menemukan dan membantu pengusaha yang potensial, baik dalam negeri maupun luar negeri; (vii) peningkatan pemanfaatan sumber daya secara lebih baik, baik swasta maupun negara (Arsyad, 1999: 127).

## 4.2. PDRB

### 4.2.1. Pengertian PDRB

Produk Domestik Bruto merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung dengan dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas

dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar).

PDRB dapat diartikan kedalam tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal tetap dan pajak langsung neto.

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto di suatu wilayah pada suatu periode (ekspor neto merupakan ekspor dikurang impor).

#### 4.2.2. Manfaat Data PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Dan dapat dimanfaatkan sebagai :



- a. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
- b. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
- c. PDRB atas dasar harga konstan (rii) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian yang menggambarkan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran yang besar menunjukkan basis perekonomian yang mendominasi perekonomian wilayah tersebut.
- e. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- f. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

#### **4.3. Pengeluaran Pemerintah**

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, salah satu diantaranya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave

(Mangkoesoebroto , 1999) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar.

Dalam konteks perekonomian negara sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting di dalam rencana pembangunan negara terbelakang. Di dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan dengan rencana keuangan. Penerapan rencana keuangan dan pencapaian perimbangan dalam arti riil dan keuangan jelas banyak tergantung pada tindakan-tindakan fiskal (Jhingan,473).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi antara lain :

#### **4.3.1. Model Pembangunan Pengeluaran Pemerintah**

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. *Pada tahap awal* perkembangan ekonomi, persentase investasi

pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. *Pada tahap menengah* pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peran swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

### 4.3.2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, U.S. dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut : dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_K PP_1}{PPK_1} < \frac{P_K PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_K PP_n}{PPK_n}$$

$P_K PP$  = Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK = pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ..n = jangka waktu (tahun)

### 4.3.3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktifitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut :

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

#### 4.4. Hipotesis

Pengeluaran pemerintah, terutama dalam pengeluaran pembangunan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tentunya akan mempunyai dampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka peran pemerintah dalam pembangunan akan semakin besar, dengan begitu maka akses sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah dapat tercapai, misalnya kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatnya kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, serta tujuan dari penelitian, maka dituliskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan Kabupaten Majalengka berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.
2. Pengeluaran pembangunan sektor kesehatan Kabupaten Majalengka berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.
3. Pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur Kabupaten Majalengka berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

## **BAB V**

### **METODE PENELITIAN**

#### **5.1. Data yang Digunakan**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Pendekatan kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil teori teori umum dari berbagai literatur maupun studi empiris untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan berupa data runtut waktu (*Time Series*). Observasi terdiri dari 15 tahun pada Kabupaten Majalengka selama periode 1988-2002. Data tersebut berupa laporan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah dalam APBD kabupaten Majalengka dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Majalengka.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari :

- 1) Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
- 2) Badan Pusat Statistik Indonesia;
- 3) Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpkpd.go.id](http://www.djpkpd.go.id)).

#### **5.2 Definisi Operasional Variabel**

Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini.

- 1) APBD yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana Anggaran yaitu anggaran rutin dan pembangunan, Pendapatan yaitu Pendapatan asli daerah dan pendapatan dari instansi yang lebih tinggi dan penerimaan lainnya, Belanja yaitu belanja rutin dan pembangunan (langsung dan tidak langsung) pada Kabupaten Majalengka tahun 1988 – 2002.
- 2) Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan adalah besarnya pengeluaran/belanja pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten Majalengka tahun 1988–2002. Dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan sektor pendidikan adalah rasio antara pengeluaran pembangunan pendidikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) daerah Majalengka pada tahun t. Rasio tersebut di hitung dengan rumus ;
 
$$PPpe_t = \left[ \frac{PPpe_t}{Y_t} \right]$$
- 3) Pengeluaran/belanja pembanguan sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita anak dan remaja yang tercermin dalam realisasi APBD kabupaten Majalengka tahun 1988 – 2002. Dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan sektor kesehatan adalah rasio antara pengeluaran pembangunan kesehatan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) daerah Majalengka pada tahun t. Rasio tersebut di hitung dengan rumus ;



$$PPks_t = \left[ \frac{PPks_t}{Y_t} \right]$$

- 4) Pengeluaran/belanja pembangunan sektor infrastruktur adalah besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah dan pemukiman dan sektor perumahan dan pemukiman serta sektor pariwisata dan telekomunikasi yang tercermin dalam realisasi APBD kabupaten Majalengka tahun 1988–2002. Dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur adalah rasio antara pengeluaran pembangunan infrastruktur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) daerah Majalengka pada tahun t. Rasio tersebut di hitung dengan rumus ;

$$PPinf_t = \left[ \frac{PPinf_t}{Y_t} \right]$$

- 5) Perekonomian daerah dalam penelitian ini, di ukur berdasarkan besarnya produk domestik regional bruto Kabupaten Majalengka berdasarkan harga konstan 1993 selama tahun 1988-2002.

### 5.3. Alat Analisis

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model regresi linier dengan metode estimasi kuadrat terkecil (*OLS*). Model umum regresi linier adalah sebagai berikut (Gujarati 1995 : 72-73) ;

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_t + \mu_t \dots\dots\dots (5.1)$$

$Y$  adalah variabel dependen/terikat

$X$  adalah variabel independen/penjelas

$\beta_1$  adalah konstanta

$\beta_2$  adalah koefisien/parameter

$\mu$  adalah error term/faktor pengganggu

$t$  adalah waktu

Dalam penelitian ini, model regresi yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan dari Skinner (1987) yaitu model pertumbuhan ekonomi makro (*macro economic growth model*) yang digunakan oleh Sung Tai Kim (1997) untuk meneliti peranan sektor publik lokal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Korea dari tahun 1970-1991, dengan menggunakan data *cross section* dan *time series* dari sebelas wilayah di Korea dan juga digunakan oleh Rahayu (2001) untuk meneliti peranan sektor publik lokal dan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi regional dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia, dengan menggunakan data *cross section* dan *time series* dari beberapa provinsi terseleksi di Indonesia dari tahun 1987-1996.

Model dari Sung Tai Kim merupakan model persamaan regresi yang menggunakan panel data *cross section* dan *time series* yang diturunkan dari model pertumbuhan ekonomi regional. Spesifikasi modelnya adalah sebagai berikut (Rahayu, 2001; 2) :

$$Y = \beta_0 + \beta_k \left[ \frac{IP}{Y} \right] + \beta_l L + \gamma_x \left[ \frac{IG}{Y} \right] + \gamma_g \left[ \frac{G}{Y} \right] G + \varphi \left[ \frac{R}{Y} \right] + \mu_i \dots\dots\dots (5.2)$$

Di mana :  $Y$  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$IP$  = Investasi Swasta

- IG = Investasi pemerintah daerah  
 L = Laju angkatan kerja  
 G = Pengeluaran /konsumsi pemerintah  
 R = Penerimaan pemerintah dari pajak atau bukan pajak  
 $\mu_i$  = Variabel gangguan

$\beta_0$  mengukur perubahan produktivitas yang tidak bias,  $\beta_k$  mengukur rata-rata *gross marginal factor product of capital* dan  $\beta_l$  mengukur elastisitas output secara keseluruhan terhadap tenaga kerja, dan  $\gamma_x$  dan  $\gamma_g$  dipakai dengan definisi secara umum.

Sementara penelitian ini mengaplikasikan model Kim untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian di daerah Kabupaten Majalengka, tetapi data yang digunakan hanya data time series yaitu tahun 1988-2002. Mengacu pada model umum regresi dan model Kim sebagaimana dituliskan diatas, maka model dalam penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 \left[ \frac{Educ_t}{Y_t} \right] + \beta_3 \left[ \frac{Health_t}{Y_t} \right] + \beta_4 \left[ \frac{Infra_t}{Y_t} \right] + \mu_t \dots\dots\dots (5.3)$$

Di mana ;

Y adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Educ adalah Besarnya pengeluaran pembangunan sektor pendidikan

Health adalah Besarnya pengeluaran pembangunan sektor kesehatan

Infra adalah Besarnya pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur

$\mu_i$  adalah faktor gangguan/ error term

Pengujian analisis regresi dalam penelitian ini meliputi uji pemilihan model empiris, uji kriteria kesesuaian teoritik, uji diagnostik yaitu uji t-statistik, uji f-statistik, interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

#### **5.4. Uji kriteria kesesuaian teoritik**

Pengujian kriteria kesesuaian teoritik dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian tanda di antara parameter/variabel estimasi yang digunakan dengan teori ekonomi. Apabila telah sesuai maka dapat dikatakan model yang diestimasi telah lolos dalam uji ini. Tanda positif menunjukkan variabel bebas searah dengan variabel terikatnya, sedangkan tanda negatif menunjukkan arah yang berlawanan.

#### **5.5. Uji Pemilihan Model**

Uji ini bertujuan untuk memilih bentuk fungsi model yang akan digunakan untuk penelitian. Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan pertanyaan atau masalah empirik yang sangat penting, hal ini karena teori ekonomi tidak secara spesifik menunjukkan ataupun mengatakan apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linear atukah log-linear atau bentuk fungsi lainnya. Selain itu, pemilihan bentuk fungsi untuk menentukan spesifikasi suatu model ekonometrika memiliki implikasi-implikasi yang penting untuk rangkaian kerja berikutnya. (Insukindro, dkk, 2001: 58).

Dalam penelitian ini, pengujian pemilihan model digunakan metode yang dikembangkan oleh McKinnon, White dan Davidson tahun 1983 (*MWD test*). Untuk dapat menerapkan uji MWD, pertama-tama anggaplah bahwa misalkan model empirik permintaan uang kartal riil di Indonesia adalah sebagai berikut:

$$UKR_t = a_0 + a_1 YR_t + a_2 IR_t + U_t \dots\dots\dots(5.4)$$

$$LUKR_t = b_0 + b_1 LYR_t + b_2 IR_t + V_t \dots\dots\dots(5.5)$$

Di mana parameter  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $b_1$  dan  $b_2$  dianggap berpangkat satu,  $UKR_t$  ( $LUKR_t$ ) adalah variabel tidak bebas.  $YR_t$  ( $LYR_t$ ),  $IR$  adalah variabel bebas sedangkan  $U_t$  dan  $V_t$  adalah variabel gangguan atau *residual*.

Berdasarkan persamaan (5.4) dan (5.5) di atas, selanjutnya dibentuk persamaan uji MWD berikut ini:

$$UKR_t = a_0 + a_1 YR_t + a_2 IR_t + a_3 Z_1 + U_t \dots\dots\dots(5.6)$$

$$LUKR_t = b_0 + b_1 LYR_t + b_2 IR_t + b_3 Z_2 + V_t \dots\dots\dots (5.7)$$

Di mana  $Z_1$  adalah nilai logaritma dari *fitted* persamaan (5.4) dikurangi dengan nilai *fitted* persamaan (5.5). Sedangkan  $Z_2$  sebagai nilai antilog dari *fitted* persamaan (5.5) dikurangi dengan nilai *fitted* persamaan (5.4).

Berdasarkan hasil estimasi persamaan (5.6) dan (5.7), apabila ditemukan  $Z_1$  signifikan secara statistik, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk linear ditolak dan sebaliknya, dan apabila  $Z_2$  signifikan secara statistik, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa model yang benar adalah log-linear ditolak dan sebaliknya.

## 5.6. Uji Diagnostik

### 5.6.1. Uji t-statistik.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodnes of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana  $H_0$  diterima (Kuncoro, 2001:49);

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam uji ini hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jika  $H_0 : \beta_i \leq 0 ; i = 1, 2, \dots, k$ , maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

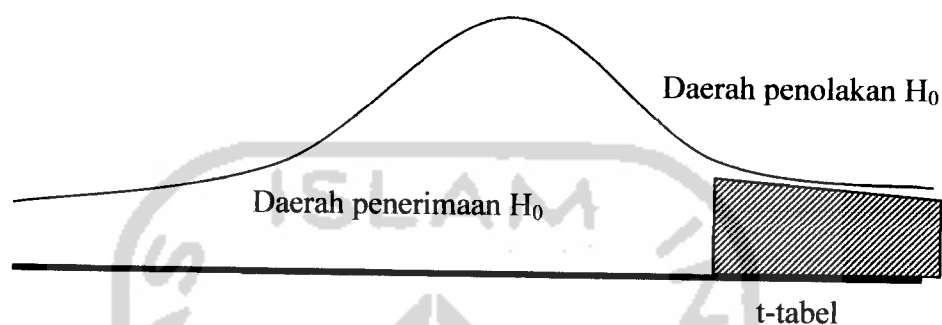
Jika  $H_a : \beta_i > 0 ; i = 1, 2, \dots, k$ , maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Penentuan daerah kritis menggunakan one tailed test ( pengujian satu sisi ) dengan terlebih dahulu menentukan tingkat signifikan  $\alpha$  dan df sehingga didapat nilai t – tabel, kemudian membandingkan dengan nilai t – hitung dan t – tabel.

Jika  $t_{hit} \leq t_{tab}$ ,  $H_0$  diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika  $t_{hit} \geq t_{tab}$ ,  $H_a$  diterima berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

## 2. Kriteria pengujian



### 5.6.2. Uji f-statistik.

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

#### 1. Bila hasil pengujian menunjukkan :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  maka variabel independen secara bersama sama tidak mempengaruhi variabel independen.

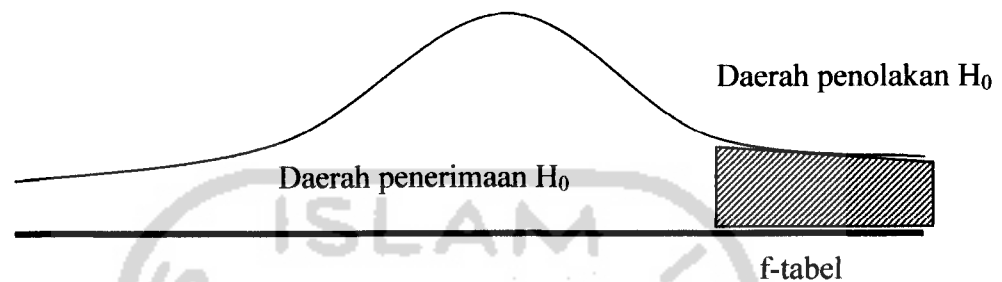
$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$  maka variabel independen secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen.

Penentuan daerah kritis menggunakan one tailed test. Dengan terlebih dahulu membandingkan  $F_{hit}$  dengan  $F_{tabel}$  pada derajat tertentu.

Jika  $F_{hit} \leq F_{tabel}$ ,  $H_0$  diterima berarti variabel independen secara bersama sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika  $F_{hit} \geq F_{tab}$ ,  $H_0$  diterima berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

## 2. Kriteria pengujian



### 5.6.3. Interpretasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Merupakan interpretasi ketepatan perkiraan yang menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel tak bebas. Interpretasi ini dapat ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien determinasi yang besarnya antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Adapun formula menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$R^2 = (TSS - SSE) / TSS = SSR / TSS \dots\dots\dots(5.8)$$

di mana  $TSS = total\ sum\ of\ squares$ ,  $SSE = sum\ of\ squares\ error$ , dan  $SSR = sum\ of\ square\ due\ to\ regression$ .

semakin tinggi nilai koefisien determinasi (mendekati 1) maka model yang digunakan atau yang dibentuk semakin baik.



## 5.7. Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik dilakukan untuk melengkapi uji statistik yang telah dilakukan sebelumnya yaitu uji F dan uji T. pengujian asumsi klasik meliputi uji uji normalitas, autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian ini menitikberatkan pada pembentukan model empiris yang baik dengan asumsi harus lolos uji asumsi klasik agar diperoleh parameter yang BLUE (*best linear unbiased estimator*).

### 5.7.1. Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk mengetahui apakah faktor pengganggu berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Jarque-Bera dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan estimasi dengan menggunakan model empiris
2. Menghitung *skewness* dan *kurtosis*
3. Menghitung besarnya nilai JB statistik dengan menggunakan rumus:

$$JB = n \left[ \frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \dots\dots\dots(5.9)$$

di mana, S adalah *skewness* dan K adalah *kurtosis*.

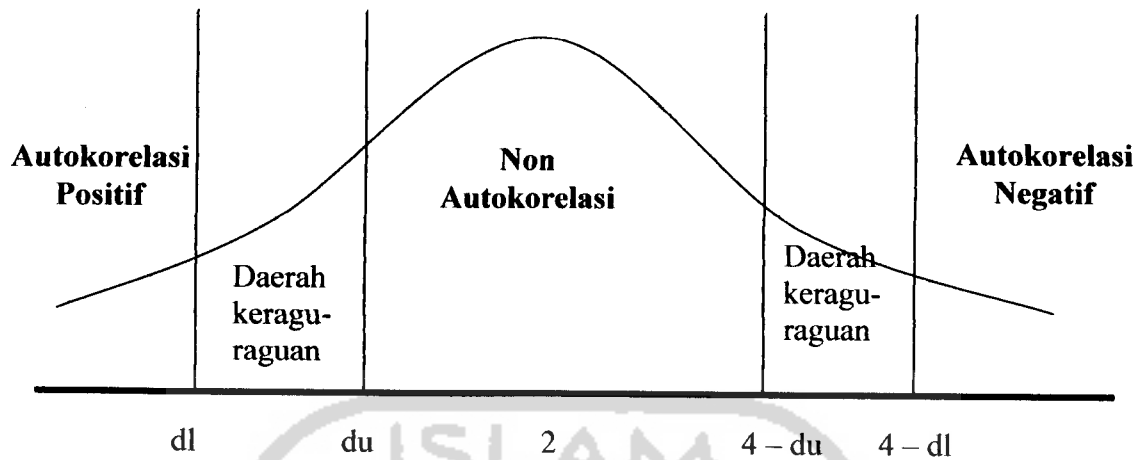
4. Selanjutnya membandingkan nilai  $JB_{hitung} = \chi^2_{hitung}$  dengan  $\chi^2_{tabel}$ . Jika  $JB_{hitung} > \chi^2_{tabel}$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual adalah berdistribusi normal ditolak. Jika nilai  $JB_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual adalah berdistribusi normal diterima.

### 5.7.2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian ruang/waktu. Dalam suatu penelitian apabila autokorelasi tidak terpenuhi maka OLS yang diperoleh tidak lagi efisien, karena selang keyakinan akan semakin melebar sehingga uji F dan uji T menjadi tidak valid dan jika diterapkan akan menghasilkan kesimpulan yang salah atau tidak tepat. Insukindro, dkk, (2001:85) mendefinisikan autokorelasi sebagai korelasi antar-anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dengan kata lain, autokorelasi adalah adanya hubungan antar-residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain

Untuk mendeteksi serta menghindari kesimpulan yang tidak tepat tersebut maka dilakukan pengujian terhadap gejala autokorelasi sedikitnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Uji Durbin Watson. Uji ini dilakukan melalui dua langkah :
  - a) Membuat suatu hipotesis  
Ho : Tidak terdapat autokorelasi  
  
Ha : Terdapat autokorelasi
  - b) Penentuan penolakan atau penerimaan hipotesis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara besarnya nilai DW – hitung dengan DW – tabel. Hal ini dapat ditunjukkan dalam gambar daerah kritis Durbin Watson sebagai berikut ;



Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

- a) Model tidak mengandung autokorelasi bila :
 
$$du \leq d \leq (4 - du)$$
  - b) Hasil uji Durbin Watson tidak bisa disimpulkan bila :
 
$$dL \leq d \leq (4 - du) \text{ atau } (4 - du) \leq d \leq (4 - dL)$$
  - c) Model mengandung Autokorelasi bila :
 
$$d < dL \text{ atau } d > (4 - dL)$$
- 2) Uji Lagrange-Multiplier. Uji ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama (*first order*) tetapi bisa juga digunakan pada tingkat derajat. Adapun langkah-langkah dari uji ini adalah sebagai berikut (Insukindro, dkk, 2001: 90):
- a) melakukan regresi dengan menggunakan model empiris yang akan diestimasi kemudian dapatkan nilai residualnya;
  - b) lakukan regresi dengan  $u_t$  sebagai variabel tak bebas dan dengan memasukkan  $u_t$  sebagai variabel bebas, atau;

- c) hitunglah nilai  $(n-1) \cdot R^2 = \chi^2_{\text{-hitung}}$  dari hasil regresi persamaan di atas.  $n - 1$  karena jumlah efektif dari observasi adalah  $n - 1$ , di mana  $n$  adalah jumlah data;
- d) lakukan uji hipotesis nol ( $H_0$ ) yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi, dengan pedoman: bila nilai  $\chi^2_{\text{-hitung}}$  lebih besar dibandingkan nilai  $\chi^2_{\text{-tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, bila nilai  $\chi^2_{\text{-hitung}}$  lebih kecil dibandingkan nilai  $\chi^2_{\text{-tabel}}$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

### 5.7.3. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari variabel bebas lainnya. Konsekuensi dari adanya multikolinieritas adalah ketidakvalidan analisis regresi yang dilakukan sehingga mengakibatkan penaksir-penaksir kuadrat terkecil menjadi tidak efisien dan bersifat bias. Indikasi adanya multikolinieritas dapat dideteksi melalui tingginya nilai  $R^2$  tetapi hanya sedikit uji-t yang signifikan. Metode lain untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas adalah dengan menggunakan korelasi parsial (*examinations of partial correlation*) yang disarankan oleh Farrar dan Glauber (Insukindro, dkk, 2001:69). Dengan menganggap bahwa model awal yang digunakan adalah  $Y_t = f(X_{1t}, X_{2t})$  maka untuk menerapkan metode korelasi perlu dilakukan tahap-tahap sebagai berikut.

- 1) Melakukan estimasi regresi dengan menggunakan model awal atau  $Y_t = f(X_{1t}, X_{2t})$ . Dari hasil estimasi model tersebut, nilai  $R^2$  yang ditemukan disebut  $R^2_1$ . kemudian lakukan regresi dengan menggunakan model

$X_{1t} = f(X_{2t})$  dan  $X_{2t} = f(X_{1t})$ . Nilai  $R^2$  yang diperoleh disebut  $R^2_2$  dan  $R^2_3$ .

- 2) *Rule of thumb* yang digunakan sebagai pedoman adalah jika nilai  $R^2_1$  lebih tinggi dibandingkan dengan  $R^2_2$  dan  $R^2_3$ , maka dalam model empiris tidak ditemukan adanya multikolinieritas.

Metode lainnya dan sangat sederhana untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melakukan uji korelasi antar masing – masing variabel independent (*matrix correlation*). Hipotesisnya adalah ;

Jika korelasi antar masing – masing variabel independen  $> 0.85$  maka terdapat multikolinieritas.

Jika korelasi antar masing – masing variabel independen  $< 0.85$  maka tidak terdapat multikolinieritas.

#### 5.7.4. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas yaitu menunjukkan kondisi di mana seluruh kesalahan (faktor pengganggu) tidak konstan atau tidak memiliki varian yang sama. Tujuan dimasukkannya faktor pengganggu dalam model adalah untuk memperhitungkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran dan karena mengabaikan variabel-variabel tertentu. Adapun konsekuensi adanya heterokedastisitas adalah sebagai berikut (Insukindro, dkk, 2001: 75-76).

- 1) Penaksir-penaksir OLS masih linier dan masih tidak bias.
- 2) Penaksir-penaksir OLS akan mempunyai varian yang tidak minimum lagi serta tidak efisien dalam sampel kecil dan besar (*asymptotically inefficient*).

- 3) Formulasi untuk menaksir varian dari penaksir-penaksir OLS secara umum adalah bias, di mana bila menaksir secara *a priori*, seorang peneliti tidak dapat mengatakan bahwa bias tersebut akan positif atau negatif. Akibatnya, *confidence interval* dan uji hipotesis yang didasarkan pada uji *t* dan nilai distribusi *F* tidak dapat dipercaya.
- 4) Prediksi yang didasarkan pada koefisien parameter variabel bebas dari data awal akan mempunyai varian yang tinggi sehingga prediksi akan tidak efisien.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji *White*, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Melakukan regresi dengan menggunakan model empiris yang sedang diamati, kemudian dapatkan nilai estimasi residualnya,  $u^2_i$ .
- 2) Melakukan estimasi dengan menggunakan regresi bantuan (*auxiliary regression*), dengan model sebagai berikut:

$$u^2_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X^2_1 + \alpha_4 X^2_2 + \alpha_5 X_1 X_2 + u_i \dots\dots\dots(5.10)$$

- 3) Tolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi jika nilai  $R^2$  hasil regresi langkah kedua dikalikan dengan jumlah data ( $\chi^2_{\text{-hitung}}$ ) lebih kecil dibandingkan dengan  $\chi^2_{\text{-tabel}}$ , sebaliknya tolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah homokedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi jika  $\chi^2_{\text{-hitung}}$  lebih besar dari  $\chi^2_{\text{-tabel}}$ .

Selain uji *White*, untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat juga digunakan uji *Gletser* yaitu dengan cara meregresi nilai absolut dari residual

terhadap semua variabel sehingga diperoleh t hitung. Bentuk persamaan Glejser dapat dituliskan sebagai berikut (Insukindro, dkk, 2001: 75-76):

$$|u_i| = \alpha + \beta_i + v_i \dots\dots\dots(5.11)$$

hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Jika t hitung > t tabel, Ho ditolak. Berarti signifikan yang dapat dinyatakan dalam persamaan regresi itu adalah heterokedastisitas.

Jika t hitung < t tabel, Ho diterima. Berarti tidak signifikan yang dapat dinyatakan bahwa dalam persamaan regresi itu tidak ada heterokedastisitas.



## BAB VI

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 6.1 Data dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian, tiga variabel penjelas (*Independen*) dan satu variabel terikat (*Dependen*), variabel penjelas terdiri dari pengeluaran pembangunan pemerintah sektor pelayanan dasar sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur sedangkan variabel terikat adalah perekonomian Kabupaten Majalengka yang dihitung dari besarnya PDRB atas dasar harga konstan selama tahun 1988-2002. Adapun deksripsi data telah dijelaskan pada BAB II, dan data yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi opsional variabel penelitian telah dijelaskan pada BAB V.

#### 6.2 Hubungan Antarvariabel

Otonomi daerah memberikan peluang pada daerah untuk membangun daerah lebih cepat dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan di daerah, hal ini akan terlihat pada pola alokasi belanja atau pengeluaran daerah, baik rutin maupun pembangunan. Alokasi belanja akan tergantung pada pendapatan daerah, sumber pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah dan pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah, dari pendapatan ini akan dialokasikan pada belanja daerah yang meliputi belanja atau pengeluaran rutin dan pembangunan. Besarnya



belanja atau pengeluaran pembangunan akan menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan di daerah.

Perekonomian di daerah akan dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan untuk mengetahui jumlah produksi masing-masing sektor ekonomi. PDRB juga akan memperlihatkan tingkat pendapatan per kapita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat jika dibagikan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Majalengka sebagai salah satu ilustrasi keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, sehingga dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh belanja atau pengeluaran pembangunan pemerintah khususnya pada sektor pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap perekonomian daerah selama tahun 1988 – 2002.

### 6.3 Hasil Analisis dan Pembahasan

#### 6.3.1. Hasil regresi

Berdasarkan pada teori dan hipotesis yang diajukan maka dapat ditulis model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 \left[ \frac{Educ_t}{Y_t} \right] + \beta_3 \left[ \frac{Health_t}{Y_t} \right] + \beta_4 \left[ \frac{Infra_t}{Y_t} \right] + \mu_t \dots\dots\dots(6.1)$$

Dimana :

Y = Produk Domestik Regional Bruto/PDRB ( juta Rp)

Educ = Pengeluaran pendidikan (ribu Rp)

Health = Pengeluaran kesehatan (ribu Rp)

Infra = Pengeluaran infrastruktur (ribu Rp)

$\mu_i$  = faktor gangguan/ error term

Dari hasil estimasi dengan bantuan program olah data Eviews 3.0 seperti yang tersaji pada lampiran vii dan viii, diperoleh ringkasan hasil regresi dan nilai koefisien model lin-lin dan model log-lin sebagaimana tersaji pada tabel 6.1 dibawah ini:

TABEL 6.1  
Ringkasan Hasil Regresi

Variabel	Model Lin-Lin			Model Log-Lin		
	Koefisien	t-statistik	prob	Koefisien	t-statistik	prob
Konstanta	33969413	2.832062	0.0163	5.453496	2.239286	0.0468
EDUC	0.110848	2.133752	0.0562	0.208087	0.939640	0.3676
HEALTH	0.142458	2.181810	0.0517	0.017721	1.668043	0.1235
INFRA	0.024876	2.602745	0.0246	0.427627	1.968077	0.0748
R2	0.882153			0.714153		
Adj R2	0.795467			0.636195		
RSS	5.46E+15			1.070836		
D-W	1.879701			1.707836		
F-stat	7.869269			9.160723		

Sumber : lampiran VII dan VIII.

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa kedua bentuk fungsi model menghasilkan tanda yang sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk memilih model manakah yang terbaik diantara model tersebut di atas maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji MacKinnon, White and Davidson (*MWD test*).

Selain itu untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi berganda yang menggunakan data *time series*, maka perlu dilakukan pengujian. Pengujian yang ini meliputi lima kriteria, yaitu: uji kesuaian teoritik, uji normalitas, uji linieritas, uji diagnostik, dan uji asumsi klasik.

### 6.3.2 Pemilihan model

Pemilihan bentuk fungsi model empiris yang baik sangat diperlukan untuk menentukan implikasi yang penting dalam rangkaian kerja hasil analisis selanjutnya. Kesalahan dalam bentuk fungsi akan menyebabkan persoalan kesalahan spesifikasi dan estimasi-estimasi koefisien akan bias, dan parameter estimasi tidak akan konsisten (Insukindro, dkk, 2001:56). Pengujian model empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji MacKinon, White and Davidson (*MWD test*) dengan pedoman jika  $Z_1$  signifikan secara statistik maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk lin-lin ditolak dan sebaliknya, jika  $Z_2$  signifikan secara statistik, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa model yang benar log-lin (*double log*) ditolak.

TABEL 6.2  
Ringkasan Hasil *MWD test*

Variabel	Model Lin-lin			Model Lin-log		
	Koefisien	t-statistik	Prob	Koefisien	t-statistik	Prob
Z	2.693070	1.724043	0.1133	2.72E-08	2.389039	0.0968

Sumber: lampiran V dan VI

Pada tabel 6.2 yang merupakan ringkasan hasil *MWD test*, dapat disimpulkan bahwa dengan derajat kepercayaan 95% ( $\alpha = 5\%$ ), bentuk model empiris, yang baik sebagai model regresi untuk menaksir pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap perekonomian di Kabupaten Majalengka dalam penelitian ini adalah model lin-lin, hal ini karena nilai koefisien dan t-statistik  $Z_1$  tidak signifikan secara statistik, yang berarti bahwa hipotesis alternatif

yang menyatakan bahwa model yang benar adalah linier diterima, sementara nilai koefisien dan t-statistik  $Z_2$  signifikan secara statistik yang berarti bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa model yang benar log-lin (*double log*) ditolak.

Berdasarkan hasil *MWD test* tersebut, maka analisis regresi selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan dengan model lin-lin dengan pendekatan kuadrat terkecil (*OLS*).

### 6.3.3. Uji kesesuaian teoritik

Pengujian ini menyangkut masalah tanda dan intensitas hubungan ekonomi dengan cara membandingkan kesesuaian tanda di antara variabel/parameter estimasi dari model yang dipilih dengan hipotesis yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil regresi model yang digunakan, diketahui bahwa semua variabel penjelas mempunyai arah atau tanda yang sesuai dengan hipotesis. Dengan kata lain, hasil estimasi terhadap model yang dipilih telah sesuai dengan teori yang dipilih. Adapun ringkasan hasil uji kesesuaian teoritik dari estimasi regresi model terpilih tersaji pada tabel 6.3 berikut ini:

TABEL 6.3  
Hasil Uji Arah atau Tanda

Variabel penjelas	Tanda yang dihipotesiskan	Hasil estimasi	Kesimpulan
Educ	+	+	Sesuai
Health	+	+	Sesuai
Infra	+	+	Sesuai

Sumber: lampiran VIII.

Dari tabel 6.3 diatas dapat diketahui bahwa koefisien hasil regresi untuk semua variabel penjelas tersebut sesuai dengan yang dihipotesiskan sehingga dapat dikatakan bahwa model lin-lin yang dipilih sebagai model penelitian lolos

dari uji kesesuaian teoritik. Variabel penjelas dimana seluruhnya merupakan besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah menunjukkan arah atau tanda koefisien positif (+), hal ini menunjukkan hubungan yang positif, di mana semakin besar atau meningkat pengeluaran pembangunan pemerintah, maka akan semakin tinggi perekonomian daerah dan begitu pula sebaliknya, dalam hal ini diasumsikan bahwa faktor yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*).

#### 6.3.4. Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk mengetahui apakah faktor pengganggu berdistribusi normal atau tidak. Hasil analisis statistik *Jarque-Bera normality test statistics* yang tersaji pada lampiran III adalah sebesar 0,610491. Bila dibandingkan dengan  $\chi^2$ -tabel ( $\alpha = 0,05; 2$ ) = 5,99146, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak karena  $\chi^2$ -hitung <  $\chi^2$ -tabel. Artinya bahwa model empiris yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

#### 6.3.5. Uji Linieritas

Linieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau salah atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji linieritas model adalah dengan menggunakan uji Ramsey RESET yang dikembangkan oleh J.B Ramsey (Insukindro, dkk, 2001:100). Adapun hasilnya adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam lampiran IV, yang diringkas dalam tabel 6.4 berikut:

TABEL 6.4  
Ringkasan Hasil Ramsey RESET Test

Ramsey RESET Test:			
F-statistic	2.344179	Probability	0.151534
Log likelihood ratio	6.289816	Probability	0.043071

Sumber: lampiran IV

Dari ringkasan yang tersaji pada tabel 6.4 di atas terlihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,344179 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dengan *degree of freedom* (pembilang =  $k-1 = 4$  dan penyebut =  $n - k = 11$ ) pada  $\alpha = 0,05$  adalah 3,36. hipotesisnya adalah jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang benar adalah linier ditolak dan sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang benar adalah linier diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model yang benar menggunakan bentuk fungsi linier yaitu model persamaan linier (lin-lin) di mana hal ini diperlihatkan dengan nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$ .

### 6.3.6. Uji Diagnostik

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodnes of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik  $t$ , nilai statistik  $F$ , dan koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana  $H_0$  diterima (Kuncoro, 2001:97).

### 6.3.6.1. Uji t-statistik

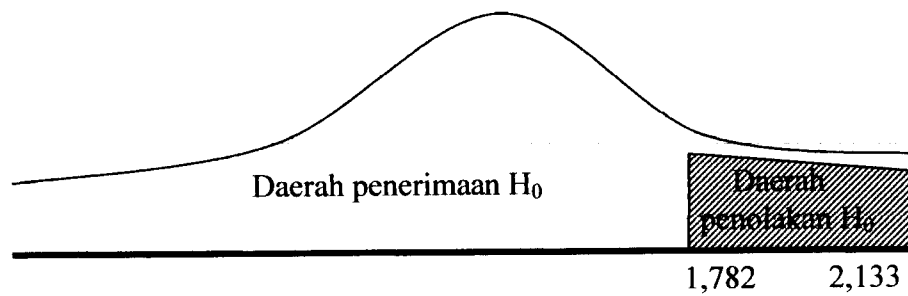
Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan tiga variabel penjelas seperti yang tersaji pada lampiran VIII, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Uji parameter variabel pengeluaran pendidikan (Educ)

$H_0 : \beta_2 \leq 0$ , di mana secara individu variabel pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

$H_a : \beta_2 > 0$ , di mana secara individu variabel pengeluaran pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-statistik sebesar 2,133752 dan t-tabel sebesar 1,782 pada  $\alpha = 5\%$  (0,05;12) dengan melakukan pengujian satu sisi berarti nilai t-statistik > t-tabel atau  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel pengeluaran pendidikan berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap perekonomian di Kabupaten Majalengka dan hasil pengujian sesuai dengan hipotesis.



Gambar 6.1  
Uji parameter variabel pengeluaran pendidikan

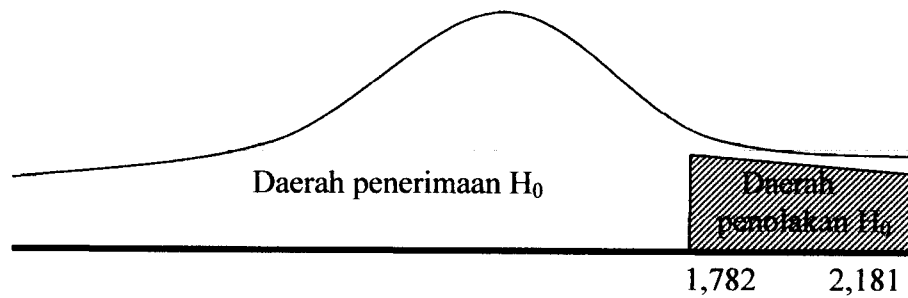
2. Uji parameter variabel pengeluaran kesehatan (Health)

$H_0 : \beta_3 \leq 0$ , di mana secara individu variabel pengeluaran kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

$H_a : \beta_3 > 0$ , di mana secara individu variabel pengeluaran kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-statistik sebesar 2,181810 dan t-tabel sebesar 1,782 pada  $\alpha = 5\%$  (0,05;12) dengan melakukan pengujian satu sisi berarti nilai t-statistik > t-tabel atau  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel pengeluaran kesehatan berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap perekonomian di Kabupaten Majalengka dan hasil pengujian sesuai dengan hipotesis.





Gambar 6.2

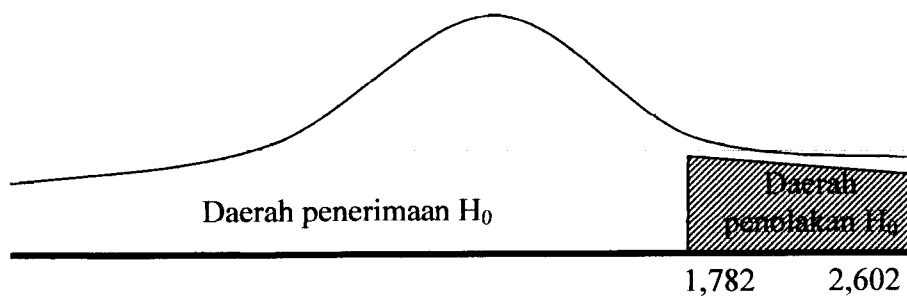
Uji parameter variabel pengeluaran kesehatan

3. Uji parameter variabel pengeluaran infrastruktur (Infra)

$H_0 : \beta_4 \leq 0$ , di mana secara individu variabel pengeluaran infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

$H_a : \beta_4 > 0$ , di mana secara individu variabel pengeluaran infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Majalengka.

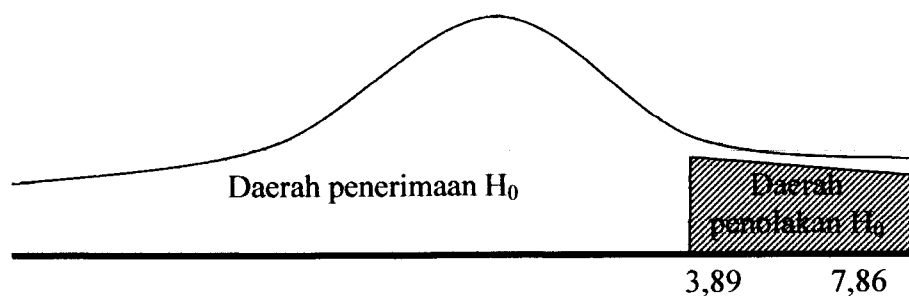
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-statistik sebesar 2,602745 dan t-tabel sebesar 1,782 pada  $\alpha = 5\%$  (0,05;12) dengan melakukan pengujian satu sisi berarti nilai t-statistik > t-tabel atau  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel pengeluaran infrastruktur berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap perekonomian di Kabupaten Majalengka dan hasil pengujian sesuai dengan hipotesis.



Gambar 6.3  
Uji parameter variabel pengeluaran infrastruktur

### 6.3.6.2. Uji F-statistik

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan regresi model terpilih yang tersaji pada lampiran 8 menunjukkan bahwa nilai  $F_{\text{hitung}}$  adalah 7,869269 sedangkan  $F_{\text{tabel}} \alpha 5\% (n-k) (k-1)$  atau  $(0,05;12;2)$  adalah 3,89. Artinya  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis yang menyatakan bahwa semua variabel penjelas secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel yang dijelaskan diterima. Dengan kata lain, variabel pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran infrastruktur secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel perekonomian di wilayah penelitian.



Gambar 6.4  
Uji F-statistik

### 6.3.6.3. Interpretasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Merupakan interpretasi ketepatan perkiraan yang menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel penjelas dapat menjelaskan variasi variabel yang dijelaskan. Dari hasil estimasi diperoleh  $R^2$  sebesar 0,882153, artinya bahwa 88,22 % variasi perubahan variabel yang dijelaskan (perekonomian) mampu dijelaskan oleh variasi perubahan variabel penjelas (pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur), sisanya sebesar 11,78 % diterangkan oleh variabel di luar model yang terangkum dalam kesalahan random.

### 6.3.7. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini menitikberatkan pada pembentukan model empiris yang baik dengan asumsi harus lolos uji asumsi klasik agar diperoleh parameter yang BLUE (*best linear unbiased estimator*). Uji ini meliputi uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas dan uji linieritas.

#### 6.3.7.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas, suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang sempurna/pasti atau mendekati sempurna di

antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Masalah multikolinieritas bisa timbul karena sifat variabel ekonomi berubah bersama-sama sepanjang waktu dan dipengaruhi oleh faktor yang sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara *Correlation matrix*. Gujarati (1995:335) mengatakan bahwa jika ada nilai antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinieritas menjadi masalah yang serius. Dari tabel 6.5 terlihat tidak ada korelasi yang sangat tinggi (di atas 0,8) antara satu variabel penjelas dengan variabel penjelas lainnya, yang berarti tidak ada multikolinieritas yang serius antarvariabel bebas dalam model.

TABEL 6.5.  
Correlation Matrix

	EDUC	HEALTH	INFRA
EDUC	1.000000	0.756225	0.731075
HEALTH	0.756225	1.000000	0.712270
INFRA	0.731075	0.712270	1.000000

Sumber : data diolah

### 6.3.7.2. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas yaitu menunjukkan kondisi di mana seluruh kesalahan (faktor pengganggu) tidak konstan atau tidak memiliki varian yang sama. Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan uji *White heteroskedasticity* maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan ditolak, karena nilai  $(\text{obs} \cdot R\text{-squared} = \chi^2_{\text{-hitung}}) = 5,830245$  dengan  $df = 7$  lebih kecil dibandingkan

dengan  $\chi^2_{\text{-tabel}} (0.05;7) = 14,0671$ . Dengan demikian, hasil uji dengan menggunakan *White heteroskedasticity* tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan. Berikut dibawah ini tabel 6.6 merupakan tabel ringkasan uji *White heteroskedasticity*.

TABEL 6.6.  
Ringkasan Uji *White heteroskedasticity*

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.847750	Probability	0.567776
Obs*R-squared	5.830245	Probability	0.442472

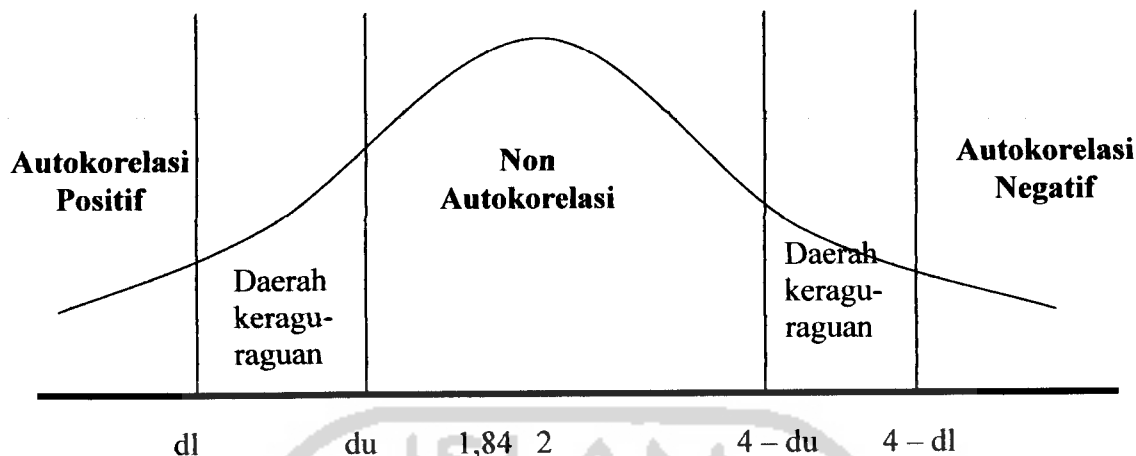
Sumber : Data diolah

### 6.3.7.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya hubungan antar-residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (*DW test*). Kriteria pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dalam model adalah sebagai berikut.

- a. Daerah  $0 < dw < dL$ , otokorelasi positif
- b. Daerah  $dL < dw < dU$ , daerah ragu-ragu
- c. Daerah  $dU < dw < 4-dU$ , lolos otokorelasi
- d. Daerah  $4-dU < dw < 4-dL$ , daerah ragu-ragu
- e. Daerah  $4-dL < dw < 4$ , otokorelasi negatif

Dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, sampel yang dimiliki sebanyak 15 observasi dan variabel penjelas sebanyak 3 tidak termasuk unsur konstanta, tabel DW menunjukkan bahwa  $dL = 0,82$  dan  $dU = 1,75$  ( $4-dL=3,18$  dan  $4-dU=2,25$ ), sehingga diperoleh kriteria sebagaimana gambar dibawah ini :



Hasil estimasi terhadap data time series dengan pendekatan OLS menunjukkan nilai Durbin Watson statistik = 1,84. Dari tabel kriteria diatas maka nilai DW-hitung tersebut terletak di daerah  $du < dw < 4-du$  atau  $1,75 < 1,84 < 2,25$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model empiris penelitian berada pada daerah non autokorelasi atau lolos autokorelasi.

#### 6.4. Interpretasi Hasil Analisis Regresi

Setelah melakukan estimasi terhadap model empiris yang terpilih yaitu model *linier*, maka untuk melakukan pembahasan lebih lanjut semua besaran konstanta dan koefisien hasil regresi dimasukkan ke dalam persamaan. Dengan demikian persamaan tersebut akan terlihat sebagai berikut:

$$Y = 33969413 + 0.110848 \text{ Educ} + 0.142458 \text{ Health} + 0.024876 \text{ Infra}$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan hasil regresi sebagai berikut :

1. Koefisien konstanta sebesar 3396413 memberikan arti bahwa jika perubahan pengeluaran pendidikan (Educ), pengeluaran kesehatan (Health) dan pengeluaran infrastruktur (infra) tetap, maka perekonomian

Kabupaten Majalengka akan mengalami perubahan yang positif sebesar Rp. 33,969,413.

2. Koefisien variabel penjelas pengeluaran pendidikan (Educ) sebesar 0,110848 memberikan arti bahwa kenaikan anggaran pembangunan pada sektor pendidikan sebesar 1 rupiah akan mendorong peningkatan perekonomian sebesar Rp. 0,110848 dengan asumsi *ceteris paribus*. Ini menunjukkan bahwa peran serta pemerintah dalam pelayanan dasar pendidikan baik berupa penambahan buku pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, beasiswa dan sebagainya merupakan faktor penting bagi peningkatan produktifitas dalam rangka mendorong perekonomian daerah.
3. Koefisien variabel penjelas pengeluaran kesehatan sebesar 0,142458 memberikan arti bahwa kenaikan anggaran pembangunan pada sektor kesehatan sebesar 1 rupiah akan mendorong peningkatan perekonomian sebesar Rp. 0,142458 dengan asumsi *ceteris paribus*. Ini menunjukkan bahwa dana-dana yang dianggarkan oleh pemerintah pada sektor kesehatan yang meliputi perbaikan dan penambahan fasilitas kesehatan, penambahan tenaga medis maupun non medis serta pelayanan gratis terhadap penduduk miskin, dan sebagainya mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam mendorong perekonomian daerah.
4. Koefisien variabel penjelas infrastruktur sebesar 0,024876 memberikan arti bahwa kenaikan anggaran pembangunan untuk infrastruktur daerah sebesar 1 rupiah akan menaikkan perekonomian daerah sebesar Rp.

0,024876 dengan asumsi *ceterius paribus*. Ini menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana daerah seperti halnya irigasi yang akan sangat menunjang produksi pertanian, perbaikan jalan, telekomunikasi, listrik, dan sebagainya merupakan faktor yang penting dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah.





## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa pada bab VI, beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah, beberapa di antara faktor tersebut adalah pengeluaran pembangunan pemerintah dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana (infastruktur). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan perekonomian daerah.
- 2) Dengan memanfaatkan regresi model linier dan tehnik estimasi kuadrat terkecil (OLS), hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa baik uji t-statistik maupun uji f-statistik memberikan dukungan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap perekonomian di Kabupaten Majalengka. Besar dan kecilnya pengeluaran pembangunan pada tiga sektor tersebut akan sangat mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Majalengka.

#### **2. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka beberapa impilkasi yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut ;

1. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka perlu mengkaji kembali pemanfaatan pengeluaran pembangunan agar lebih diarahkan pada sektor-sektor yang mempercepat perekonomian daerah, dan perlunya mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan di samping dana alokasi umum dari pemerintah pusat dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, karena di era otonomi daerah maka daerah itu sendiri yang akan menentukan arah dan kebijakan daerah, sehingga alokasi pengeluaran pembangunan tersebut dapat dijadikan pemacu perekonomian daerah.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka harus lebih meningkatkan lagi alokasi pengeluaran terhadap 3 (tiga) sektor pelayanan dasar yang mendukung terciptanya perekonomian, sehingga pemanfaatan sektor ini yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke-4*; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka., *Majalengka Dalam Angka*, (Berbagai Terbitan).
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah*, (Berbagai Terbitan)
- Buffers John, Shah Anwar, 1998. Productivity of Public Spending, Sectoral Allocation, Choices and Economic Growth, *Economic Developmen and Cultural Change Volume.46, No.2, 291-303*
- Blakely, E. 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*, Second Edition, Sage Publications, United State Of America.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Gujarati,D, 1999. *Essential of Econometrics.*, McGraw-Hill.Inc. Second Edition, London.
- Ida Bagus Raka Surya Atmaja, 2001. *Peranan Investasi Swasta, Investasi Sektor Publik Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Bali Dari Tahun 1995-2000*. Tesis MEP (tidak dipublikasikan).
- Insukindro, Maryatmo, R dan Aliman, (2001). Modul Ekonometrika Dasar dan Penyusunan Indikator Unggulan Ekonomi, *Lokakarya ekonometrika dalam Rangka Penjajakan Leading indikator Ekspor di KTI*.
- Jhingan, ML.1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan)*, CV Rajawali ,Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2001, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*, Erlangga. Jakarta.

\_\_\_\_\_, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan (teori, masalah, dan kebijakan)*, Edisi Ketiga. AMP YKPN. Yogyakarta.

Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.

Rahayu Siti Aisyah Tri, *Peranan Sektor Lokal Dan Sektor Swasta Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional Dan Kesenjangan Yang Terjadi Di Indonesia (1987-1996)*, Empirika, Nomer 27, 2001. Hal 1-21

Rosyadi, Imron, 2000. *Hubungan Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*, Tesis MEP (tidak dipublikasikan).

Samuelson Paul, 1997. *Mikroekonomi ,edisi keempatbelas (terjemahan)*, Penerbit Erlangga,Jakarta.

Setiati, Ira, 1996. Pengaruh Penggunaan Variabel Demografi dalam Model Pertumbuhan Ekonomi: Kasus 25 Propinsi di Indonesia, 1983-1992, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLIV, Nomor 2, 121-161*

Todaro, MP, 2000. *Economic Development seventh edition*, Longman Inc, England.

Wahyuni Heni, The Role Of Govement In Economic Growth : Evidence From Asia and Pasific Countries, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 19, No.1 2004, hal 71-81*

[www.djpkpd.go.id](http://www.djpkpd.go.id)

# LAMPIRAN



وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَاتِكُمْ مَعَهُ

## Lampiran I

## Data

Tahun	Y	EDUC	HEALTH	INFRA
1988	369.399,00	57.069,00	24.957,00	1.907.827,00
1989	392.209,00	452.614,00	546.515,00	2.751.847,00
1990	339.960,00	1.311.773,00	1.030.825,00	5.768.153,00
1991	375.000,00	2.389.544,00	665.524,00	5.511.329,00
1992	400.944,00	2.974.470,00	806.060,00	7.133.892,00
1993	862.539,00	1.378.815,00	1.294.397,00	7.704.462,00
1994	931.056,24	2.382.175,00	947.678,00	8.932.059,00
1995	1.008.596,61	3.036.135,00	741.390,14	9.325.516,00
1996	1.094.661,75	2.947.795,00	835.551,00	10.716.768,00
1997	1.147.606,63	3.676.345,00	1.264.442,32	11.204.558,20
1998	1.040.316,22	5.587.434,00	1.394.168,00	22.593.714,00
1999	1.076.716,03	3.002.092,00	789.152,00	14.706.974,00
2000	1.126.602,13	1.806.829,00	952.620,00	16.309.566,00
2001	1.182.141,67	7.965.000,00	5.376.889,00	28.336.021,00
2002	1.220.769,35	6.315.140,00	3.309.472,19	37.237.286,41

Di mana:

Y = Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB (juta Rp)

Educ = Pengeluaran Pendidikan (ribu Rp)

Health = Pengeluaran Kesehatan (ribu Rp)

Infra = Pengeluaran Infrastruktur (ribu Rp)

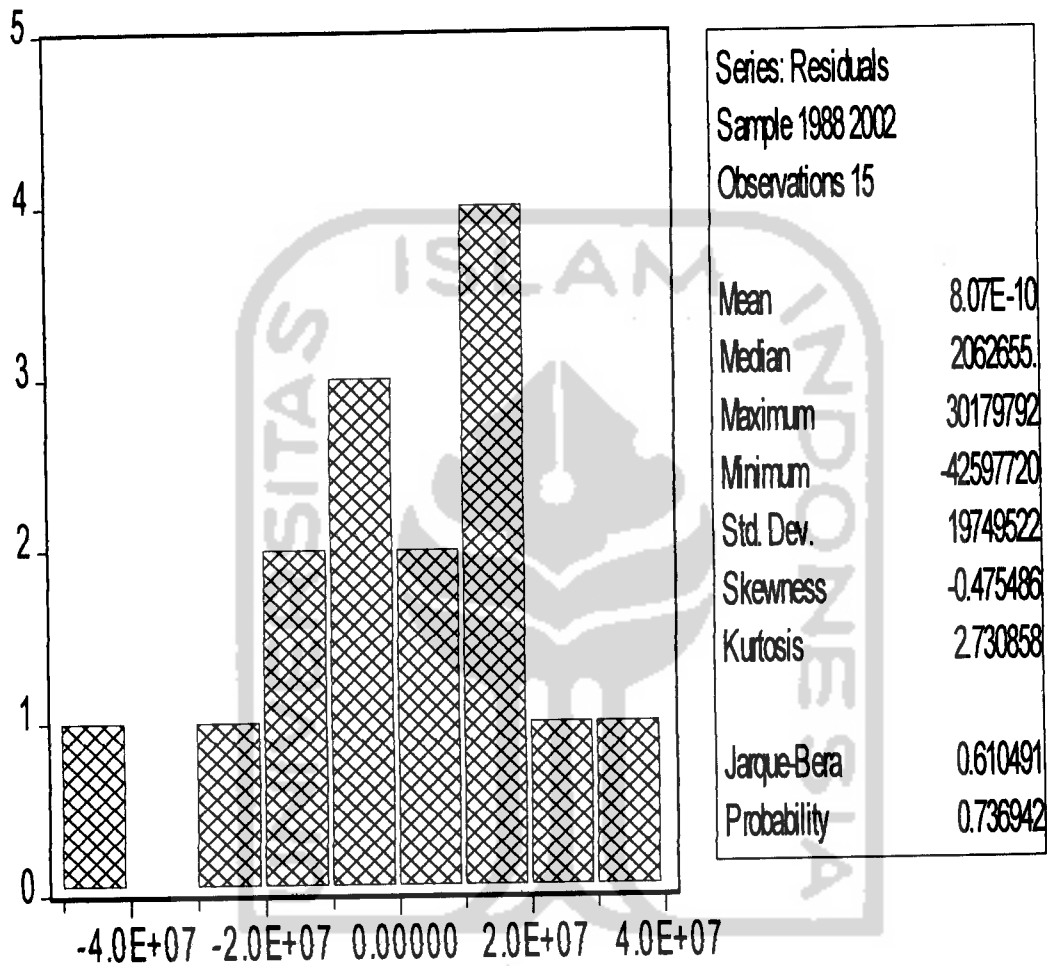
## Lampiran II

## Data Rasio Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Majalengka

TAHUN	Y	EDUC	HEALTH	INFRA
1988	369399.00	0.154491485	0.067561092	5.164678302
1989	392209.00	1.154012274	1.393427994	7.016277036
1990	339960.00	3.858609836	3.032194964	16.96715202
1991	375000.00	6.372117333	1.774730667	14.69687733
1992	400944.00	7.418666946	2.010405443	17.79273914
1993	862539.00	1.598553805	1.500682288	8.93230567
1994	931056.24	2.558572616	1.017852584	9.593468811
1995	1008596.61	3.010256995	0.735071021	9.246031473
1996	1094661.75	2.692882071	0.763296059	9.790026919
1997	1147606.63	3.203488812	1.101808134	9.763413618
1998	1040316.22	5.370899629	1.340138674	21.71812144
1999	1076716.03	2.788192909	0.732924911	13.65910193
2000	1126602.13	1.603786245	0.845569145	14.4767754
2001	1182141.67	6.737771117	4.548430308	23.97007205
2002	1220769.35	5.17308204	2.710972544	30.50313019

## Lampiran III

## Uji Normalitas





## Lampiran IV

## Uji Linieritas

Ramsey RESET Test:				
F-statistic	2.344179	Probability	0.151534	
Log likelihood ratio	6.289816	Probability	0.043071	
Test Equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 12/22/05 Time: 01:44				
Sample: 1988 2002				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19950474	83143563	0.239952	0.8157
EDUC	0.334770	1.060727	0.315604	0.7595
HEALTH	0.430436	1.364695	0.315408	0.7596
INFRA	0.088864	0.242111	0.367038	0.7221
FITTED^2	1.08E-08	1.15E-07	0.093877	0.9273
FITTED^3	2.50E-17	4.31E-16	0.058079	0.9550
R-squared	0.791018	Mean dependent var	83790118	
Adjusted R-squared	0.674916	S.D. dependent var	35030576	
S.E. of regression	19973075	Akaike info criterion	36.74684	
Sum squared resid	3.59E+15	Schwarz criterion	37.03006	
Log likelihood	-269.6013	F-statistic	6.813164	
Durbin-Watson stat	1.969368	Prob(F-statistic)	0.006814	

## Lampiran V

## MWD test Linier

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 12/22/05 Time: 00:24				
Sample: 1988 2002				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33969413	12734421	2.667527	0.0248
EDUC	0.590392	0.234599	2.516602	0.0577
HEALTH	0.057440	0.012835	4.475262	0.0221
INFRA	0.505109	0.200162	2.523501	0.0510
ZI	2.693070	1.562067	1.724043	0.1133
R-squared	0.904661	Mean dependent var		18.13477
Adjusted R-squared	0.992526	S.D. dependent var		0.517286
S.E. of regression	0.044721	Akaike info criterion		-3.115562
Sum squared resid	0.019999	Schwarz criterion		-2.879545
Log likelihood	28.36671	F-statistic		465.7888
Durbin-Watson stat	1.474554	Prob(F-statistic)		0.000000



## Lampiran VI

## MWD test Log-lin

Dependent Variable: Ln(Y)				
Method: Least Squares				
Date: 12/22/05 Time: 00:26				
Sample(adjusted): 1993 2001				
Included observations: 8				
Excluded observations: 1 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.91584	9.336197	3.846945	0.0310
Ln(EDUC)	0.490392	0.234599	2.090338	0.1277
Ln(HEALTH)	0.027440	0.012835	2.137932	0.1221
Ln(INFRA)	0.505109	0.300162	1.682789	0.1910
Z2	2.72E-08	1.14E-08	2.389039	0.0968
R-squared	0.872309	Mean dependent var		18.46791
Adjusted R-squared	0.702053	S.D. dependent var		0.109549
S.E. of regression	0.059797	Akaike info criterion		-2.526552
Sum squared resid	0.010727	Schwarz criterion		-2.476901
Log likelihood	15.10621	F-statistic		5.123534
Durbin-Watson stat	1.690234	Prob(F-statistic)		0.105333

## Lampiran VII

## Regresi Log-Lin

Dependent Variable: Ln(Y)				
Method: Least Squares				
Date: 12/22/05 Time: 00:42				
Sample: 1988 2002				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Ln(EDUC)	0.208087	0.221454	0.939640	0.3676
Ln(HEALTH)	0.017721	0.010624	1.668043	0.1235
Ln(INFRA)	0.427627	0.217282	1.968077	0.0748
C	5.453496	2.435372	2.239286	0.0468
R-squared	0.714153	Mean dependent var		18.13477
Adjusted R-squared	0.636195	S.D. dependent var		0.517286
S.E. of regression	0.312008	Akaike info criterion		0.731600
Sum squared resid	1.070836	Schwarz criterion		0.920413
Log likelihood	-1.486997	F-statistic		9.160723
Durbin-Watson stat	1.707836	Prob(F-statistic)		0.002506



## Lampiran VIII

## Regresi Linier

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 12/22/05 Time: 01:14				
Sample: 1988 2002				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33969413	11994589	2.832062	0.0163
EDUC	0.110848	0.051950	2.133752	0.0562
HEALTH	0.142458	0.065294	2.181810	0.0517
INFRA	0.024876	0.009558	2.602745	0.0246
R-squared	0.882153	Mean dependent var		83790118
Adjusted R-squared	0.795467	S.D. dependent var		35030576
S.E. of regression	22280465	Akaike info criterion		36.89950
Sum squared resid	5.46E+15	Schwarz criterion		37.08831
Log likelihood	-272.7462	F-statistic		7.869269
Durbin-Watson stat	1.879701	Prob(F-statistic)		0.004411

## Lampiran IX

## Multikolinieritas

	EDUC	HEALTH	INFRA
EDUC	1.000000	0.756225	0.731075
HEALTH	0.756225	1.000000	0.712270
INFRA	0.731075	0.712270	1.000000



## Lampiran X

## Heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	0.847750	Probability	0.567776	
Obs*R-squared	5.830245	Probability	0.442472	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 12/22/05 Time: 00:17				
Sample: 1988 2002				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.12E+13	5.01E+14	0.062372	0.9518
EDUC	5169315.	3914933.	1.320410	0.2232
EDUC^2	-0.003163	0.005420	-0.583529	0.5756
HEALTH	1257033.	3038891.	0.413648	0.6900
HEALTH^2	-0.005006	0.007969	-0.628153	0.5474
INFRA	-818600.9	880411.2	-0.929794	0.3797
INFRA^2	0.000118	0.000203	0.583368	0.5757
R-squared	0.388683	Mean dependent var	3.64E+14	
Adjusted R-squared	-0.069805	S.D. dependent var	4.96E+14	
S.E. of regression	5.13E+14	Akaike info criterion	70.88426	
Sum squared resid	2.10E+30	Schwarz criterion	71.21468	
Log likelihood	-524.6320	F-statistic	0.847750	
Durbin-Watson stat	1.880902	Prob(F-statistic)	0.567776	

## Lampiran XI

## Residual Plot

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1988	3.7E+07	7.7E+07	-4.0E+07	* .   .
1989	3.9E+07	6.1E+07	-2.2E+07	. *   .
1990	3.4E+07	6.8E+07	-3.4E+07	*   .
1991	3.8E+07	7.0E+07	-3.3E+07	*   .
1992	4.0E+07	9.6E+07	-5.6E+07	* .   .
1993	8.6E+07	6.9E+07	1.7E+07	.   * .
1994	9.3E+07	7.9E+07	1.4E+07	.   * .
1995	1.0E+08	8.4E+07	1.7E+07	.   * .
1996	1.1E+08	8.4E+07	2.5E+07	.   * .
1997	1.1E+08	7.9E+07	3.5E+07	.   . *
1998	1.0E+08	1.2E+08	-1.1E+07	. *   .
1999	1.1E+08	9.6E+07	1.1E+07	.   * .
2000	1.1E+08	9.4E+07	1.9E+07	.   * .
2001	1.2E+08	6.8E+07	5.0E+07	.   . *
2002	1.2E+08	1.2E+08	5777756	.   * .